



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 6 (Enam)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Ketua Dewan Komisioner LPS
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 6 November 2019
Waktu : 10.00 WIB s.d. 13.28 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI
Ketua Rapat : H. Dito Ganinduto, MBA
Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono
Acara : Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana Kerja 2020
Hadir : KETUA DEWAN KOMISIONER LPS / HALIM ALAMSYAH

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F-PG)

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

**Yang terhormat saudara Ketua Dewan Komisioner LPS beserta jajarannya,
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI dan hadirin yang
berbahagia.**

Menurut laporan dari sekretariat Komisi XI DPR RI, rapat intern Komisi XI DPR RI telah dihadiri dan menandatangani daftar hadir sebanyak 10 anggota, 6 fraksi, dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 Peraturan DPR tentang Tata Tertib telah terpenuhi. Untuk itu dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* izinkanlah kami membuka rapat intern Komisi XI DPR RI dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Saudara Ketua Dewan Komisioner LPS, anggota DPR, serta hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat kerja hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, tuhan yang maha kuasa, karena berkat rahmat hidayah dan karunianya pada hari ini kita dapat menghadiri acara rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan saudara Ketua Dewan Komisioner LPS dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hal-hal yang akan kita bicarakan dan simpulkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Sebelum kita memulai agenda rapat kerja pada hari ini, izinkan kami Pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI masa bakti 2019-2024 untuk memperkenalkan diri karena kita perdana ini Pak ya, jadi kita memperkenalkan diri mungkin dari sini dulu apa kiri dulu itu Ibu dulu Bu, Ibu dulu yang, ya silahkan Bu.

F-PD (Hj. SITI MUFATTAHAH, P.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan anggota Komisi XI yang saya hormati beserta tamu undangan hari ini dari LPS.

Alhamdulillah sudah lengkap sepertinya, para jajaran LPS sudah hadir semua. Perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Siti Mufattahah dari Fraksi Partai Demokrat (A-547) daerah pemilihan Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik, dan Kota Tasikmalaya. Ini adalah lanjutan dari perjuangan saya sebelumnya, jadi saya bermitra dengan LPS sudah setahun yang lalu hampir dua tahun yang lalu jadi mudah-mudahan kedepannya karena peran dan fungsi dari LPS ini sangat luar biasa, kami berharap kinerjanya kedepan lebih baik lagi dengan bekerja sama dengan anggota Komisi XI untuk secara keseluruhan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Lanjut mba Puteri, dipanggil Ibu ga mau ini, atau dek Puteri silakan.

F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDDIN, B.Com.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi semuanya.

Izin Pimpinan memperkenalkan diri. Bapak-Bapak Ibu-Ibu jajaran Pimpinan beserta pengurus dari LPS, nama saya Puteri Komaruddin dari Fraksi Partai Golkar, dari Dapil Jawa Barat VII meliputi Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan Bekasi.

Terima kasih banyak.

Wabillahitaufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-P. GERINDRA (SUSI MARLENY BACHSIN, S.E., M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Izin Pimpinan memperkenalkan diri.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh anggota Komisi XI beserta seluruh komisioner LPS.

Perkenalkan nama saya Susi Syahdona Marleny Bachsin, saya dari Fraksi Gerindra Dapil Bengkulu, nomor anggota A-74.

Terima kasih.

F-P. GERINDRA (ARDHYA PRATIWI S., S.E., M.Sc.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi.

**Yang saya hormati Pimpinan beserta teman-teman anggota Komisi XI,
Yang saya hormati Ketua Dewan Komisioner LPS beserta jajaran.**

Perkenalkan nama saya Ardhya Pratiwi, nomor anggota A-93, daerah pemilihan Jawa Barat X meliputi Kabupaten Pangandaran, Ciamis, Kuningan, dan Kota Banjar, dari Fraksi Partai Gerindra.

Terima kasih.

F-PDIP (DOLFIE O. F. P.):

**Selamat pagi Pimpinan,
Selamat pagi Pak.**

Perkenalkan nama saya Dolfie dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Tengah IV.

Terima kasih

F-PDIP (SIHAR P.H. SITORUS):

**Selamat pagi Pimpinan,
Selamat pagi dari LPS.**

Perkenalkan nama saya Sihar Sitorus, nomor anggota A-139 dari daerah pemilihan Sumatera Utara II meliputi 19 kota/kabupaten yang terdiri dari Nias Raya, Labuan Batu Raya, Tapanuli bagian Selatan, Tapanuli Raya. Dari Fraksi PDI Perjuangan.

Terima kasih.

F-PD (MARWAN CIK ASAN):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Selamat pagi Ketua,
Selamat pagi Pimpinan LPS.**

Saya Marwan Cik Asan (A-535) dari Fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan Lampung II.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Andreas silakan.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Selamat pagi.

Perkenalkan kembali, nama saya Andreas Eddy Susetyo dari Fraksi PDI Perjuangan, sekarang nomor anggotanya berubah jadi A-214 sebelumnya 195. Dari daerah pemilihan Jawa Timur V, Malang Raya (Kabupaten dan Kota Malang, serta Kota Batu).

Terima kasih.

F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, izin Pimpinan, saya Anis Byarwati dari daerah Pemilihan DKI Jakarta I meliputi seluruh Kotamadya Jakarta Timur, 10 kecamatan, dan 65 kelurahan di Jakarta Timur, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Izin Pimpinan, perkenalkan saya Hj. Wartiah dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, daerah pemilihan NTB II Lombok meliputi Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Nomor 474, mudah-mudahan kedepan sinergitas terbangun antara Komisi XI dengan jajaran Dewan Komisioner LPS.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PDIP (H. MUSTHOFA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Seizin Pimpinan, perkenalkan saya Musthofa dari Fraksi PDI Perjuangan nomor anggota 180, A-180, mewakili daerah pemilihan dari Kudus, Jepara, dan Demak.

Terima kasih.

F-P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Atas seizin Pimpinan, saya perkenalkan diri kepada kawan-kawan dewan komisioner LPS, nama saya Fauzi H. Amro, daerah pemilihan Palembang raya atau Sumsel I Pak ada enam kabupaten/kota disitu dari Palembang sampai ke Musi Rawas. Dari Fraksi Partai Nasdem nomor anggota A-356.

Terima kasih Pak Ketua.

F-PKB (ALI AHMAD):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan dan jajaran LPS. Perkenalkan nama kami nama saya Ali Ahmad, anggota A-40 dapil V Jawa Timur meliputi Malang raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-P. NASDEM (SATORI, S.Pdi., M.M.):

Terima kasih.

Seizin Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Satori dari Fraksi Partai Nasdem daerah pemilihan Jawa Barat VIII meliputi kota/kabupaten Cirebon dan Indramayu, nomor anggota A-368.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PKS (H. HIDAYATULLAH, S.E):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Melalui Pimpinan saya memperkenalkan diri, nama Hidayatullah (A-412) daerah pemilihan Sumatera Utara I (Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Sudah selesai ya? Baik selanjutnya agenda rapat kerja hari ini adalah evaluasi kinerja tahun 2019 dan rencana kerja anggaran Lembaga Penjaminan Simpanan tahun 2020. Lembaga Penjamin Simpanan didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2009.

LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan terus aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2019, anggaran pendapatan LPS diperkirakan naik sebesar 2,21 triliun dari ... (suara tidak jelas) tahun 2018 yang sebesar 17,8 triliun menjadi 20,01 Triliun atau naik 12,41% dari ...(suara tidak jelas) tahun 2018. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh asumsi pertumbuhan simpanan pada tahun 2019 sebesar 9,0%. Anggaran beban tahun 2019 diperkirakan naik sebesar 797,62 miliar dari ...(suara tidak jelas) tahun 2018 yang sebesar 1,82 triliun menjadi 2,62 triliun. Kenaikan anggaran beban tahun 2019 akibat akan ada 20 BPR yang dicabut izin usahanya dimana klaim penjaminan untuk 20 BPR tersebut diperkirakan sebesar 371,71 miliar.

Selain itu juga LPS menganggarkan beban resolusi bank sebesar 23,63 miliar untuk penyelesaian dan penanganan bank gagal. Jika dibandingkan dengan ...(suara tidak jelas) tahun 2018 beban ...(suara tidak jelas) bank mengalami kenaikan sebesar 132,29% atau 13,47 miliar jika dibandingkan dengan ...(suara tidak jelas) tahun 2018 sebesar 10,18 miliar. Anggaran belanja kebutuhan LPS

tahun 2019 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 58,13 miliar dari ...(suara tidak jelas) tahun 2018 yang sebesar 42,88 miliar menjadi 101,02 miliar atau naik 135,50 miliar dari ...(suara tidak jelas) tahun 2018.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2009, Dewan Komisiner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahun yang telah disetujui serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat. Dalam kesempatan rapat kerja pada hari ini, Komisi XI DPR RI ingin mendapatkan informasi terkait dengan evaluasi kinerja tahun 2019 serta rencana kerja di tahun anggaran 2020. Untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada saudara Ketua Dewan Komisiner LPS untuk menyampaikan paparannya, waktu kami persilakan.

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS (HALIM ALAMSYAH):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera,

Selamat Pagi,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi XI DPR RI.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota dewan Komisi XI DPR RI serta hadirin sekalian.

Pertama-tama kami ingin mengucapkan syukur *alhamdulillah* kepada Allah SWT, tuhan yang maha esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada hari ini sehingga kita semua dapat bertemu pertama kali dalam keadaan yang sehat walafiat.

Pada pagi hari ini kami mewakili Lembaga Penjamin Simpanan, salah satu dari empat anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Perkenankan kami di hadapan Ibu dan Bapak sekalian memenuhi undangan yang kalau tidak salah diganti jadi rapat kerja kalau saya tidak salah Pimpinan mengenai evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang LPS.

Sebelum kami menyampaikan materi yang merupakan ringkasan dari yang kami sudah sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, perkenankan kami memperkenalkan diri. Saya Halim Alamsyah selaku Ketua Dewan Komisiner,

samping saya Bapak Fauzi Ichsan sebagai anggota dewan komisioner merangkap kepala eksekutif, di sebelah kanan saya Pak Didik Madiyono sebagai anggota dewan komisioner yang baru saja dilantik beberapa waktu yang lalu menggantikan Ibu Destry Damayanti yang sudah diangkat sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia, sebelah kiri Pak Fauzi adalah Bapak Erwin Rijanto selaku anggota dewan komisioner ex-officio yang mewakili Bank Indonesia, sehari-harinya beliau adalah deputi gubernur Bank Indonesia yang membidangi stabilitas sistem keuangan.

Dapat kami sampaikan saat ini kami masih ada dua anggota komisioner, yang satu Pak Heru Kristiyana sebagai anggota dewan komisioner ex-officio mewakili OJK, kami mohon maaf beliau tidak bisa hadir kebetulan ada dinas, sementara yang satu lagi adalah anggota dewan komisioner ex-officio Kementerian Keuangan, namun sejak 1 November yang lalu yang Bapak Robert Pakpahan sebelumnya adalah dirjen pajak setelah memasuki masa purnabakti. Jadi kami mohon maaf Bapak Ibu sekalian kami hadir sekarang lengkap kurang Bapak Heru Kristiyana, begitu Bapak Pimpinan.

Bapak-Bapak dan Ibu anggota dewan yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan materi dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama kami menyampaikan sebagai pembuka perkembangan ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan atau SSK. Lalu kedua kami akan memaparkan perkembangan jumlah bank peserta penjaminan dan pertumbuhan simpanan masyarakat, dan yang terakhir kinerja LPS pada tahun 2019 dan rencana kerja dan serta anggaran tahun 2020.

Seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, perkembangan dewasa ini menunjukkan ekonomi dunia tengah memasuki era ketidakpastian menuju kondisi *new normal*. Kondisi *new normal* tersebut diwarnai oleh gejolak tidak hanya di pasar keuangan, namun juga melibatkan aspek yang lebih luas di luar faktor ekonomi dengan tingkat kompleksitas masalah yang makin tinggi atau yang tadi dinamakan ...(suara tidak jelas) Sepanjang tahun 2019, IMF (International Monetary Fund) berulang kali melakukan koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang kesemuanya mengarah pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pada bulan Oktober yang lalu, IMF kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3% untuk tahun 2019 dan 3,4% di tahun 2020. Proyeksi ini masing-masing turun 0,2 dan 0,1% dari proyeksi periode sebelumnya yang dilakukan oleh IMF pada bulan Juli yang lalu.

Beberapa hal secara khusus patut kita soroti terkait dengan potensi resiko penyebab pelemahan ekonomi di tahun ini maupun yang akan datang.

- a. Dampak eskalasi perang dagang yang sering kita dengar antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, eskalasi tersebut berkembang menjadi ketikpastian tidak hanya di pasar keuangan tetapi juga di sektor investasi dan prospek pertumbuhan ekonomi. Peningkatan berbagai hambatan perdagangan menyebabkan banyak kalangan memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan global dapat menurun dari 3,7% pada tahun lalu menjadi hanya tumbuh 1,1% sepanjang tahun ini. Kekhawatiran akan eskalasi dan retaliasi

perang dagang akan menurunkan investasi, mengganggu rantai pasokan dan memperlambat pertumbuhan produktivitas. Dampak dari situasi tadi setidaknya sudah mulai terlihat dari perlambatan yang terjadi di ekonomi Tiongkok. Dalam jangka panjang, perang dagang berpotensi menurunkan *output* ekonomi global dalam dua tahun kedepan sebesar 0,4% hingga 0,6% per tahun.

- b. Beberapa isu geopolitik kawasan yang potensial memberikan tekanan pada ekonomi antara lain kemungkinan Brexit tanpa kesepakatan, krisis ekonomi di Turki dan Argentina, serta gejolak Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada ...(suara tidak jelas) hasil komoditas ekspor khususnya migas.
- c. Beberapa bank sentral telah berupaya mengurangi dampak perlambatan dengan melonggarkan kebijakan moneterinya. Secara agresif bank sentral memangkas suku bunga kebijakan dan berupaya melakukan berbagai langkah stimulus untuk menjaga momentum.

KETUA RAPAT:

Pak interupsi dulu, yang Bapak baca mana ya yang barusan?

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Yang di depan ini resumennya Pak.

KETUA RAPAT:

Oh resumennya, memang *nggak* ada disini?

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Ada, sudah ada.

KETUA RAPAT:

Nggak ada di pemaparan Bapak?

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Ada cuman mungkin ini oleh kawan-kawan dibuat supaya jadi lebih *summary* aja Pak ringkasan. Boleh kami lanjutkan Pak?

Langkah ini cukup positif membantu tekanan pelemahan ekonomi namun disisi lain juga memiliki resiko berupa volatilitas pada modal asing atau *capital outflow* dari negara berkembang yang dapat mempengaruhi nilai tukar dan berpotensi mengganggu proses pemulihan ekonomi negara berkembang.

- d. Dalam pertumbuhan tahunan LPS sedunia di forum International Association of Deposit Insurers atau IADI pada bulan September yang lalu juga menyoroti dampak perlambatan ekonomi dan perdagangan dunia terhadap meningkatnya resiko keuangan yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. IADI menyarankan negara-negara anggotanya untuk melakukan langkah-langkah antisipatif, antara lain dengan memperkuat kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral terutama dalam mengatasi beberapa isu resolusi bank antara lain *cross-border resolution*.

Di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global dan potensi resesi yang meningkat, kita patut bersyukur ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2019 tetap mampu tumbuh sebesar 5,02% secara *year on year*. Meskipun demikian, beberapa lembaga internasional seperti IMF, ADB, dan World Bank memproyeksikan ekonomi nasional di tahun ini dapat tumbuh di kisaran 5,04% dan selanjutnya akan sedikit membaik di 5,18% pada tahun depan.

Di sisi lain, tingkat inflasi sepanjang tahun 2019 juga diperkirakan akan relatif stabil di kisaran 3%. Koordinasi kebijakan KSSK yang terus diperkuat berdampak positif pada stabilitas sistem keuangan di negara kita. Koordinasi kebijakan yang telah dilakukan selama ini diantara empat institusi cukup berhasil mempertahankan ... sistem keuangan sehingga mampu tetap mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Selain itu sinergi kebijakan juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan eksternal melalui berbagai upaya meningkatkan ekspor barang dan jasa serta menarik aliran modal asing termasuk penanaman modal. Menghadapi resiko pelemahan ekonomi dan ...(suara tidak jelas) di pasar keuangan, pemerintah dan otoritas di bidang keuangan yaitu Bank Indonesia, OJK, dan LPS tentu tidak tinggal diam. Berbagai langkah telah dilakukan baik dari sisi aspek moneter, fiskal, perbankan, maupun penjaminan simpanan dalam rangka mempertahankan kepercayaan publik terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Dari sisi moneter seperti kita telah ketahui, Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga kebijakan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 100 basis poin sejak bulan Juli hingga Oktober 2019. BI juga sudah melakukan realisasi kebijakan makprudensial dan memperkuat kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan pendalaman pasar keuangan.

Dari sisi fiskal, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas belanja dan menjaga pelaksanaan program-program prioritas dan mengantisipasi potensi pelebaran defisit fiskal.

Dari sisi sektor jasa keuangan, OJK antara lain mengoptimalkan kontribusi sektor jasa keuangan dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, memantau transmisi kebijakan moneter di pasar dan lembaga jasa keuangan, mempertajam kebijakan dan insentif dalam rangka pendalaman pasar keuangan.

Dari sisi LPS, merespons tren penurunan suku bunga simpanan yang terjadi secara bertahap pasca penurunan suku bunga kebijakan moneter oleh Bank Indonesia serta kondisi likuiditas perbankan yang relatif membaik, LPS pada periode

September yang lalu juga menurunkan kembali tingkat bunga penjaminan pada bank umum dan BPR masing-masing 25 basis poin menjadi sebesar 6,5% dan 9% untuk rupiah, sementara untuk valuta asing menjadi sebesar 2%. Mempertimbangkan bahwa proses penyesuaian suku bunga simpanan masih berlangsung, LPS akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan tingkat bunga penjaminan sesuai dengan perkembangan suku bunga simpanan dan hasil *assessment* atas kondisi ekonomi makro, likuiditas perbankan, serta stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan data industri perbankan yang dipantau LPS, dewasa ini rata-rata permodalan industri perbankan per September 2019 berada di kisaran 23,28% dengan rentang permodalan per kelompok Buku berada pada kisaran 22,07% hingga 25,37%. Resiko kredit industri perbankan terpantau terkendali dengan rata-rata *gross NPL* sebesar 2,66%, relatif sama dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu. Kendati demikian, apabila diukur berdasarkan *credit at risk* yaitu NPL ditambah dengan kredit-kredit yang telah direstrukturisasi, industri perbankan cenderung mengalami peningkatan dari 9,2% pada Desember 2018 menjadi 10,5 pada September 2019.

Sementara itu *Loan to Deposit Ratio* atau LDR cenderung naik dari 93,39% pada September 2018 menjadi 93,76% pada September 2019. Disatu sisi, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan intermediasi perbankan tetap tumbuh walaupun sedikit tertekan, disisi lain kenaikan LDR juga terjadi karena melambatnya pertumbuhan simpanan dari 7,62% pada Agustus 2019 menjadi 7,47% pada bulan September ini. Namun demikian, secara umum kondisi likuiditas di sektor perbankan tetap kondusif sejalan dengan menurunnya suku bunga simpanan pada industri perbankan. Secara umum kondisi SSK atau Stabilitas Sistem Keuangan dan perbankan dari perspektif LPS berada dalam kondisi stabil dan tetap terkendali. Ekonomi Indonesia diperkirakan masih akan dapat tumbuh dengan kondisi SSK yang terkendali, namun demikian adanya ketidakpastian global dan munculnya beberapa resiko seperti kondisi defisit neraca transaksi berjalan, resiko perlambatan pertumbuhan DPK dan peningkatan *credit at risk* atau ...(suara tidak jelas) aset masih tetap perlu kami waspadai.

Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, perkenankan kami sekarang untuk menyampaikan sedikit kinerja LPS. Mengemban amanat Undang-Undang LPS No. 24 tahun 2004 dan Undang-Undang PPKSK No. 9 tahun 2016, LPS menjalankan fungsinya sebagai otoritas di bidang penjamin simpanan dan resolusi bank. Dalam hal penjaminan simpanan, seluruh bank wajib menjadi peserta penjaminan LPS dimana per Oktober 2019 terdapat 111 bank umum terdiri dari 97 bank umum konvensional dan 14 bank umum syariah, serta 1717 BPR/BPRS dimana terdiri dari 1552 BPR konvensional dan 165 BPR syariah, dengan maksimum simpanan yang dijamin sebesar 2 miliar per nasabah per bank. Program penjaminan LPS mencakup 99,91 jumlah rekening atau setara dengan 308,07 juta rekening dan apabila diukur dengan nilai, program penjaminan LPS mencakup 53,27% dari total nilai simpanan atau setara dengan 3245,89 triliun. Dapat kami sampaikan bahwa jumlah akumulasi

premi yang dihimpun dari bank peserta penjaminan sejak LPS berdiri yaitu sejak 2005 hingga saat ini telah mencapai 94,63 triliun.

Selanjutnya dalam hal resolusi bank sejak berdiri dari tahun 2005 hingga saat ini, LPS telah melaksanakan likuidasi terhadap 100 bank yang terdiri dari 99 BPR/BPRS dan 1 bank umum, serta melakukan penyelamatan satu bank gagal yang dimandatkan oleh KSSK pada tahun 2008. Jumlah klaim penjaminan simpanan layak bayar sampai dengan September 2019 telah mencapai 1,55 triliun yang mencakup 237.788 rekening.

Bapak dan Ibu anggota dewan yang terhormat. Secara finansial, LPS saat ini memiliki tingkat solvabilitas yang memadai dengan tingkat cadangan penjaminan mencapai 91,3 triliun dari total aset sebesar 118,7 triliun per September 2019. Jika dibandingkan dengan total simpanan industri perbankan, rasio akumulasi cadangan penjaminan per September 2019 telah mencapai 1,55% dari target rasio yang ditetapkan oleh undang-undang LPS sebesar 2,5% dari seluruh total simpanan.

Pada tahun 2020, LPS memproyeksikan cadangan penjaminan akan meningkat menjadi 108 triliun dengan proyeksi total aset LPS sebesar 139,85 triliun. Sementara itu proyeksi akumulasi cadangan penjaminan dibandingkan dengan proyeksi total simpanan mencapai 1,70% pada tahun 2020. Sejak diundangkan Undang-Undang No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau Undang-Undang PPKSK, LPS mendapatkan mandat baru antara lain:

1. Menambah metode resolusi bank gagal dengan *purchase and assumption* dan *bridge bank* yang semula LPS hanya dapat melakukan likuidasi atau menyelamatkan bank melalui penyertaan modal sementara.
2. Menyelenggarakan Program Restrukturisasi Perbankan atau PRP apabila terjadi krisis.
3. Kewenangan untuk melakukan akses yang lebih dini atau *early access* terhadap bank bermasalah.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang PPKSK tersebut, LPS melaksanakan berbagai program transformasi dengan bantuan teknis dari lembaga internasional maupun dari konsultan yang kami sewa sendiri baik yang sifatnya pengembangan organisasi dan SDM, infrastruktur, teknologi informasi, kebijakan penjaminan dan resolusi bank, serta perubahan nilai dan budaya organisasi. LPS juga melakukan dan mendorong riset-riset nasional dan internasional antara lain melalui LPS *call for research* dan seminar kerja sama, seminar *research*, kerja sama BI, LPS, dan OJK.

Hasil transformasi yang dijalankan sejak tahun 2017 antara lain perubahan struktur organisasi, perbaikan proses bisnis resolusi bank, penerapan pengukuran kinerja berbasis *Behavioral Anchored Rating System* atau BARS, dan penerapan nilai dan budaya organisasi yang baru, serta pelaksanaan dan program transformasi ini akan terus kami laksanakan hingga tahun 2021.

Menjawab tantangan kedepan di tahun 2020, LPS akan melanjutkan transformasi melalui penguatan infrastruktur resolusi bank dan penyiapan Program

Restrukturisasi Perbankan atau PRP dalam rangka menjalankan stabilitas sistem keuangan. Beberapa kegiatan strategis yang akan dilakukan adalah:

- a. Pengembangan infrastruktur persiapan penyelenggaraan PRP
- b. Pengembangan kebijakan dalam rangka penjaminan simpanan dan resolusi bank yang efektif dan efisien
- c. Optimalisasi *recovery rate* penjaminan simpanan
- d. Peningkatan kualitas data *surveillance* untuk mendukung kesiapan penjaminan dan resolusi bank
- e. Peningkatan hubungan kelembagaan dan layanan informasi publik
- f. Penguatan kapasitas SDM dan budaya kerja yang mendukung resolusi bank.
- g. Pengembangan infrastruktur dan teknologi informasi untuk jangka panjang

KETUA RAPAT:

Pak maaf Pak sebelum lanjut. PRP itu apa Pak, PRP.

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

PRP adalah singkatan dari Program Restrukturisasi Perbankan Pak. Ya kami lanjutkan Pak.

Berdasarkan rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT tahun 2020, proyeksi pendapatan adalah sebesar 21,81 triliun, beban sebesar 2,65 triliun, dan surplus sebelum pajak sebesar 19,16 triliun. Selanjutnya proyeksi nilai investasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 136,49 triliun. Berdasarkan Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang LPS, investasi LPS hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia atau SBN dan atau Bank Indonesia atau sertifikat Bank Indonesia. Disamping itu sebagai pelaksanaan dari Pasal 38 Undang-Undang PPKSK, LPS saat ini tengah membangun kesiapan dalam rangka penyelenggaraan PRP. Saat ini LPS telah menyusun konsep desain operasionalisasi dan mekanisme kerja PRP.

Selanjutnya LPS juga akan menyusun pengaturan yang bersifat operasional atas pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan PRP. Dapat kami tambahkan PRP ini hanya diaktifkan oleh presiden ketika kondisi sedang krisis Pak. Dalam rangka mempercepat waktu pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada nasabah, dewasa ini LPS juga sedang menyiapkan *Single Customer View* atau SCV dimana setiap bank akan diwajibkan menyiapkan data penjaminan simpanan per nasabah secara terkonsolidasi sebagai usaha LPS untuk mempercepat pembayaran klaim penjaminan.

Sebagai anggota KSSK, LPS juga secara periodik mengikuti rapat berkala KSSK yang telah diselenggarakan sebanyak empat kali sepanjang tahun 2019 yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober yang lalu. Dalam rapat berkala tersebut, LPS menyampaikan *assessment* stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka mengantisipasi dan menguji *Standard Operating*

Procedure atau SOP penanganan bank gagal. Setiap tahun LPS melakukan simulasi baik secara internal, antar lembaga diantara anggota KSSK, maupun secara tingkat nasional. Sejak tahun 2016, simulasi tingkat nasional dalam rangka pelaksanaan undang-undang PPKSK dilakukan dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS.

Sesuai dengan visi LPS menjadi lembaga penjamin simpanan dan resolusi bank yang terdepan dan diakui di tingkat nasional dan internasional, LPS juga menjadi salah satu anggota *executive council* atau Exco, asosiasi LPS sedunia, dan melakukan kerja sama bilateral dengan beberapa LPS dari negara lain dalam bentuk MoU guna melakukan pertukaran data dan informasi serta *sharing* pengalaman terkait pelaksanaan penjaminan simpanan maupun resolusi bank. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini terdapat beberapa LPS dari negara lain seperti Thailand, Vietnam, Kazakhstan, Laos, Nigeria, dan Tanzania, yang telah meminta bantuan teknis kepada LPS untuk mengembangkan program penjaminan simpanan dan resolusi bank di negara masing-masing.

Bapak dan Ibu anggota dewan yang terhormat, saya akhiri pemaparan ini dan dari kami dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu anggota dewan yang terhormat atas kesempatan bagi kami dalam acara rapat kerja pada pagi hari ini, dan selanjutnya tentu kami mengharapkan arahan dan masukan dari Ibu dan Bapak sekalian.

Demikian Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Dewan Komisioner LPS yang telah memberikan paparannya pada rapat kerja pada hari ini, dan untuk menyingkat waktu disini sudah ada 10 penanya, kami persilakan kepada yang terhormat anggota Komisi XI DPR RI untuk memberikan pertanyaan mungkin mulai dari Pak Dolfie dulu sebelah kiri yang pertama mendaftar. Nanti dilanjutkan dengan Pak Musthofa. Silakan Pak Dolfie.

F-PDIP (DOLFIE O. F. P.):

Terima kasih Ketua.

Terima kasih Pak Halim, Ketua Dewan Komisioner LPS yang telah menyampaikan penjelasannya tadi.

Ada beberapa Pak tambahan penjelasan yang perlu kami dapatkan. Pertama tadi Bapak menyampaikan dalam pengantarnya tentang stabilitas sistem keuangan yang dimulai dari ekonomi dunia, resiko ekonomi global, resiko yang perlu diwaspadai. Nah LPS juga tergabung di dalam KKSK ya Pak ya? Nah kami ingin tau apa indikator dari *early warning system* keuangan nasional kita agar tidak masuk ke

dalam krisis, jadi sudah terdeteksi sejak awal, apa indikator-indikator yang menunjukkan bahwa fundamental sistem keuangan kita ini kuat.

Yang kedua, di undang-undang LPS disebutkan fungsi LPS itu adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Nah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan itu dilakukan dengan kebijakan-kebijakan, nah apa saja kebijakan-kebijakan LPS dalam hal membangun stabilitas sistem perbankan itu, dan indikator-indikator capaiannya itu seperti apa Pak di dalam menerapkan kebijakan stabilitas sistem perbankan.

Kemudian ketiga Pak, di *slide* berapa ini tadi, *slide* enam dan tujuh. Di *slide* enam Pak, itu ada tabel tentang jumlah bank peserta penjaminan, dari tahun 2014 sampai tahun 2019 bank umum, BPR dan BPRS, itu kalau dilihat dari 2014 sampai 2019 itu ada 112 bank yang kemudian tidak lagi menjadi peserta penjaminan, nah disini kayaknya belum ada Pak penjelasannya kenapa 112 bank ini kemudian tidak lagi menjadi peserta penjaminan. Kalau dilihat di *slide* tujuh, bank yang dicabut itu hanya 44, jadi saya belum mendapat *link* nya itu Pak terkait dengan jumlah bank peserta penjaminan yang tidak lagi menjadi peserta.

Terakhir Pak, raker hari ini adalah evaluasi kinerja LPS Pak, tadi di *slide* 11 sudah disampaikan rencana kerja strategis pada tahun 2020. Sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang LPS Pak, itu ada dua *concern* yang harusnya disampaikan oleh LPS kepada DPR. Yang pertama adalah rencana kerja anggaran tahunan beserta evaluasinya, nah ini yang kita belum lihat untuk tahun 2019 anggaran tahunannya seperti apa kemudian rencana kerjanya seperti apa, indikator yang harus dicapai seperti apa capaiannya seperti apa ga ada, padahal hari ini kita bicara soal evaluasi sesuai pada Pasal 87 hal itu juga harus disampaikan kepada DPR walaupun kita tidak menyetujui anggaran dari LPS tadi laporan kerjanya disampaikan, nah ini yang kita belum lihat Pak. Misalnya saja di tabel yang disampaikan ini rencana kerja strategis, apa indikator masing-masing daripada poin satu sampai tujuh ini yang kita sebut sebagai indikator kinerja dari LPS, inikan normatifnya aja Pak rencana kerja strategisnya ini, indikatornya apa dampaknya kepada nasabah atau kepada perbankan apa dari tujuh rencana kerja strategis ini.

Demikian Pimpinan mohon ditambahkan penjelasan mengenai hal tersebut. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih yang terhormat Pak Dolfie. Selanjutnya Pak Musthofa.

F-PDIP (H. MUSTHOFA):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Izin Pimpinan. Tentunya kepada Pak Ketua Dewan Komisiner LPS beserta seluruh anggota dewan komisiner yang saya hormati pada pagi hari ini.

Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait secara implementatif Bapak. Apa yang dipaparkan daripada komisiner LPS ini sungguh sangat menarik, akan tetapi saya ingin tau bahwa ukuran cara menengarai untuk bank gagal ini apakah dilihat dari sisi TKS nya saja karena dalam laporan setiap bank ada laporan publikasi, atau ada faktor-faktor lain sehingga bisa diantisipasi. Kami tidak ingin bahwa LPS ini yang selama ini rencana kerja dan lain sebagainya bahwa saat ini untuk menetapkan tarif iuran, jumlah besaran jaminan yang dijamin LPS ini yang terpenting.

Yang kedua, apa saja yang dilakukan LPS terhadap anggota penjaminan ini yang diantara lain bahwa saat ini yang kami rasakan dan kami lihat itu adalah hanya satu untuk sosialisasi LPS ini juga nampaknya juga belum pernah kami dengar. Yang kedua juga bahwa yang ada adalah berbentuk surat edaran dan lebih ekstremnya mohon maaf ini selalu hanya menampilkan bahwa bank ini adalah anggota atau jaminan LPS, hanya pasang stiker seperti itu LPS, ini yang menurut kami perlu disampaikan. Dan juga pada kali ini LPS adalah ngambil ...(suara tidak jelas) fungsi dari BPPN dalam tata kelolanya maka jangan sampai nanti *recovery* nya rendah. Pengalaman dari BPPN yang pada saat itu bahwa fungsi LPS ini harus betul-betul bisa lebih baik dan juga, yang sampai saat ini sudah menyelamatkan kalau tadi paparan tadi saya lihat dari bank umum satu, bank BPR dan BPR Syariah ini sudah hampir 99 nah ini saya berharap betul-betul untuk *recovery* nya jangan sampai rendah seperti BPPN.

Dan ... terakhir pada kali ini bahwa saya di *slide* untuk 12, sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini, LPS berperan aktif dalam rapat berkala KSSK, empat kali rapat selama tahun 2019 saya mohon izin tidak mengurangi rasa hormat para Komisiner, untuk apa sih yang diperbincangkan dan apa yang disampaikan dalam rapat ini sehingga kami sebagai anggota Komisi XI ini benar-benar tau apa yang diperbincangkan ini dan apa isinya.

Terakhir, bahwa LPS menjadi anggota International Association of Deposit Insurers (IADI) menyusun MoU dengan beberapa LPS di negara lain untuk pertukaran informasi atau *sharing* pengalaman, ini hanya satu hal yang menjadikan satu lembaga keuangan di perbankan. Memungkinkan tidak hasil *sharing* pengalaman LPS ini di negara lain, adakah di negara lain yang meng-*cover* tentang kegagalan lembaga keuangan yang namanya *insurance* untuk asuransi, karena yang pada saat ini marak dengan kasus terjadinya di Bumiputra, Asuransi Jiwasraya, memungkinkan *ndak* karena asuransi ini hanyalah untuk asuransi dan lain sebagainya bahwa untuk Indonesia ini sudah *load* nya sudah *full* semua rata-rata sudah keluar semua maka harapan kami, kalau memang itu diperlukan hasil *sharing* di negara mana yang sudah ada sehingga nanti hasil *sharing* ini bisa kalau perlu memang berupa undang-undang atau perlu untuk menerbitkan undang-undang baru *insyallah* kami akan *support* LPS secara sepenuh hati dan seutuhnya.

Saya rasa itu Bapak-Bapak Komisioner, Bapak Ibu sekalian, barangkali saya menanyakan hal yang lebih implementatif yang kira-kira bisa dirasakan betul sehingga kami ketika untuk berdiskusi atau mengadakan FGD yang ada di wilayah dan di daerah ini ada manfaatnya sebagai anggota Komisi XI ini benar-benar bisa menjalankan tugas dan amanat dengan baik.

Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Musthofa.

Selanjutnya yang terhormat Pak Sihar Sitorus.

F-PDIP (SIHAR P.H. SITORUS):

Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian.

Saya Sihar Sitorus (A-139), kebetulan saya debutan di Komisi XI dan di DPR RI ini jadi mungkin pertanyaan saya sangat dangkal dan mendasar. Kalau saya cermati tadi pemaparan dari Bapak-Bapak saya sepertinya kok mendapatkan *mix signal* tentang kondisi perekonomian Indonesia dan sekaligus juga kinerja daripada LPS. Tadi dikatakan di *slide* awal *gross NPL* kita itu ada 2,66%, setelah ditambahkan dengan restrukturisasi menjadi 10,5%. Nah ini salah satu *mix signal* yang dalam bayangan saya kok sepertinya ini ada sesuatu yang lebih parah daripada yang ditampilkan gitu, jadi mungkin perlu ada pendalaman data dan lainnya sehingga kita mendapatkan gambaran yang sesungguhnya terhadap kondisi perbankan kita saat ini.

Kemudian di *slide* enam dan tujuh ini kalau *gasalah*, ya *slide* tujuh, ini kok saya prihatin dengan mereka yang dicabut izinnya dari 2014 sampai 2019 sementara ada satu bank yang diselamatkan gitu. Jadi pertanyaannya adalah apa sih parameternya indikator untuk kemudian dicabut dan ada satu penyelamatan ini ada suatu, saya *ngga* tau bahasanya gimana mengatakan, tapi ada suatu ketimpangan rasanya gitu.

Di *slide* enam tentang cakupan penjaminan kita bisa lihat dari Desember 14 sampai Oktober 19 hampir 100% rekening dijamin, namun nominal yang dijamin mengalami penurunan. Saya membayangkan saat ini apabila terjadi sesuatu diluar sana kira-kira uang saya ini akan masuk nominal yang dijamin atau tidak gitu karena ini setengah daripada yang dijamin gitu 3245 triliun, 53,27% itu yang dijamin. Nah kalau kita *ngelihat* lagi ke bukunya daripada LPS di halaman 11 dengan keuangan dan aset seperti ini apakah terjadi *rush* lah kita simulasikan gitu dalam benak kita ini apa yang terjadi apabila terjadi itu *rush* sementara aset kita jauh lebih

kecil daripada nominal yang akan dijamin.

Kemudian masih berkaitan dengan *slide* enam tadi, walaupun ada strategi kebijakan kira-kira bagaimana *crisis handling*-nya terhadap situasi-situasi yang ekstrem, meskipun kita tidak indikator saat ini tapi apabila itu terjadi kesiapan kita seperti apa.

Sementara itu dulu Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Selanjutnya Bu Vera dulu.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Makasih Pak, tadi saya terlambat mohon maaf. Saya perkenalkan dulu, nama saya Vera Febyanthi. Pak Halim mungkin sudah lupa dengan saya, disini ada kawan saya Fauzi. Dari Fraksi Partai Demokrat, fraksi yang sama, kali ini saya berangkat dari dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Karawang, Bekasi, dan Purwakarta), kalau yang lalu dari DKI.

Pertanyaan saya singkat saja, bukan singkat tapi saya ingin menanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh rekan saya Pak Dolfie berkaitan dengan undang-undang LPS, semangat kita pada tahun 2006 itu ingin melakukan, 2004 dan 2008 dimulai ingin melakukan perubahan revisi terhadap undang-undang LPS sehingga disahkannya tahun 2008. Disini memang tidak secara tertulis terkait mengenai laporan kepada DPR RI, namun kalau kita melihat di Pasal 88 ini kepada BPK RI, BPK RI itu adalah mitra kerja kami. Tentunya ini ambivalen kalimat terhadap BPK RI tidak dicakupkan terhadap DPR RI dulu, memang kalau sudah ke BPK RI tentunya harus melalui mekanisme DPR RI yaitu apalagi LPS sebagai mitra kerja Komisi XI.

Kami memang dari dulu tidak pernah mendapatkan evaluasi atau penyerapan terkait persoalan masalah anggaran LPS karena mereka ini skemanya tidak menggunakan APBN, tapi premi/pungutan. Tapi begitu juga dengan OJK pada saat itu tapi kita berkewajiban untuk mendapatkan data tersebut mengenai sistem penganggaran ataupun anggaran proyeksi untuk APBN 2020 maupun penyerapan 2019.

Jadi saya kira undang-undang LPS ini memang seiring dengan dinamika atau dinamisnya perbankan dan beberapa peraturan yang sudah kita buat mengenai undang-undang PPKSK harus disinkronisasi dengan undang-undang LPS, yang belum ada hanya perubahan. Kita ingin melakukan penguatan disini, bukan kepada DPR nya tapi kepada LPS nya. Terkait dengan beban dan fungsi LPS ini sudah bertambah, yang saya baca-baca disini bahwa LPS itu mempunyai satu pekerjaan tambahan mengenai penanganan permasalahan bank sistemik dan *purchase and assumption*, itu tambahan program kerja baru ya dan penyertaan modal sementara dan juga ada penanganan permasalahan solvabilitas bank selain bank

sistemik dan *purchase and assumption* ada juga yang namanya *bridge bank*. Nah disini *gaada*, memang itu dalam aturan, jadi kita minta apakah ini menjadi inisiatif DPR RI mungkin dari kami yang akan melakukan perubahan atau melakukan sinkronisasi terhadap undang-undang yang baru dan aturan-aturan fungsi dan beban tugas LPS yang sudah bertambah, jadi sebaiknya dilakukan penguatan di dalam undang-undang untuk bisa memperkuat aturan-aturan tersebut, jangan sampai nanti ganti lagi apa namanya dewan komisioner ataupun pimpinan yang ada di LPS ini semuanya berubah lagi, akhirnya nanti yang perbankan yang merasa dirugikan setiap pergantian pemimpin itu berganti lagi. Tapi kalau sudah *binding law* mereka harus mengikuti, kita ingin memperkuat LPS ini supaya fungsi dan tugasnya semakin kuat lagi.

Dan yang ingin saya tanyakan ini berkaitan juga selanjutnya mengenai berapa premi penjamin simpanan yang dipungut LPS kepada seluruh perbankan...

(REKAMAN TERPUTUS)

Lanjut, jadi mengenai premi pinjaman simpanan yang dipungut LPS itu kita butuh berapa jumlah seluruhnya pada saat sampai saat ini jadi yang berjalan *on going*. Dan mengenai berapa jumlah dana pihak ketiga perbankan sampai saat ini, begitu juga dengan premi penjamin, pin simpanan yang dipungut oleh LPS.

Selanjutnya mengenai jika di dalam jumlah DPK perbankan sampai saat ini besaran premi penjamin saya tidak melihat simpanan yang ...(suara tidak jelas) cukup ideal untuk dipungut LPS itu berapa, karena kan ini berubah-ubah. Jadi yang idealnya itu berapa sih seiring dengan perkembangannya dunia usaha perbankan yang sampai saat ini tumbuh pesat yang dibutuhkannya berapa.

LPS tentunya harus menaikkan premi dari total DPK untuk perbankan yang memiliki rasio cakupan modalnya yang tidak ideal misalnya yang dibawah Buku 3, karena mereka memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi dibandingkan bank Buku 1 dan 2. Jadi saya pikir ini memang semakin apa namanya modal mereka semakin kecil tentunya kenaikan premi itu harus semakin tinggi dibandingkan *general* ataupun Buku 1 dan Buku 2. Saya pikir itu yang harus menjadi *concern* terhadap fungsi yang, karena ini kan sudah cukup lama ya Pak ya tahun 2006 karena kalau LPS ini kan dinamika gitu loh. Jadi berapa banyak undang-undang yang sudah tidak selaras dengan undang-undang LPS yang sudah kita revisi, bayangkan 2004 kita bentuk LPS, 2008 sudah berubah, karena memang seperti itu perubahan itu memang cepat sekali.

Dan yang terakhir mengenai di halaman tujuh saya lihat ada 99 bank, *eh* halaman berapa tadi ya, 99 bank yang izin usahanya dicabut. Nah tentunya kita kan tadi sudah saya sampaikan bahwa LPS itu mempunyai beban tugas terhadap undang-undang PKSK yang sudah dibuat dan kita berharap untuk kedepannya dan jika disini ada 34 bank yang dicabut usahanya. Jadi dari 99 ada lagi tahun 2016 34 bank. Mengenai permasalahan tersebut, saya meminta LPS itu menggunakan metode atau resolusi apa yang bisa dilakukan kedepannya, apakah memang

menggunakan *least cost test model* nya itu seperti apa tolong dijabarkan karena banyak pemahaman dari teman-teman ini yang belum bisa, mohon maaf kami ini dari latar belakang berbeda-beda gitu loh, jadi tolong bahasa-bahasa itu lebih diperjelas maksud dan tujuan karena saya mencoba membaca di beberapa aturan-aturan yang menjadi fungsi tambahan tugas baru itu harus diselaraskan dengan penyampaian Bapak-Bapak dari LPS.

Saya kira itu saja dari saya dan kedepannya saya mendukung tugas dan kewenangan LPS ini memang harus diperkuat dan dibutuhkan tantangan kedepan mengingat kita tau indikator ekonomi, faktor eksternal masih terus dinamis. Jadi dengan penguatan-penguatan apa yang bisa kita perkuat disini fungsi tugas dan LPS tentunya harus di-*legal binding* yaitu mengenai aturan undang-undang yang harus saya pikir perlu dan sangat *urgent* untuk dilakukan revisi demi peningkatan Bapak, bukan demi kepentingan kita, kita ingin karena kita sayang dengan LPS. Betul, karena saya salah satu 2006 itu yang mendukung *support* LPS dan penjamin yang 2 miliar itu memang sudah tidak seiring lagi dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini, tadi kan pertanyaan dari Pak Sihar mengenai berapa jumlahnya, kita akan ditanggung atau di-*cover*. 2 miliar hanya 2 miliar, kalau uang saya 10 miliar ya berarti 2 miliar, *the rest nya goodbye*. Memang kita cukup tinggi dibandingkan *benchmark* negara Amerika dan lain-lain dibandingkan Asia itu kita cukup tinggi mungkin salah satu yang tertinggi di dunia. Tapi beda kondisi pasar mereka disana cukup stabil, Indonesia ini kan dinamis negara berkembang masih *emerging market* jadi harus disesuaikan.

Saya kira itu saja dari saya, untuk kedepannya yang menjadi pr kedepannya yaitu segera kita duduk bersama-sama kira-kira apa yang harus dilakukan penguatan di dalam beberapa pasal yang memang sudah tidak selaras lagi dengan undang-undang yang baru yang memang harus dibutuhkan sinkronisasi demi kepentingan dan kemajuan serta penguatan LPS kedepannya.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Ibu Vera.

Selanjutnya kami persilakan Bu Siti, keluar? Oke. Bu Siti *gaada* lanjut aja sebelah kanan, Pak Andreas mau duluan? Mau ada dipanggil Bu Mega katanya. Diizinkan *ga nih* ama yang lain ini silakan aja Bu Anis.

F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Ketua, yang sudah terdaftar Ketua saya.

KETUA RAPAT:

Sudah sudah sudah daftar sudah.

F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Sudah masuk itu?

KETUA RAPAT:

Sudah sudah, Bapak sudah saya daftar.

F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Engga maksudnya kan sudah tertulis.

KETUA RAPAT:

Sudah sudah saya tulis sudah.

Yaudah silakan silakan, Bu minta izin Bu ya boleh Bu Siti. Tadi Pak Andreas sudah pesan duluan soalnya. Silakan silakan, tergantung negosiasi lah berdua lah. Ya silakan Bu Siti, eh Bu Anis.

F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Minta izin Pimpinan dan terima kasih Pak Andreas, tapi memang di *list* nya saya duluan tadi ya.

Kepada Bapak Ketua Komisioner dan juga kawan-kawan di LPS selamat datang dan senang sekali mudah-mudahan kita bisa sinergi ya. Ini saya membaca yang sambutan ya, *file* yang diberikan kepada kami tentang sambutan Bapak Komisioner. Ini di halaman sembilan, "selanjutnya dalam hal resolusi bank sejak berdiri dari tahun 2005 hingga saat ini, LPS telah melaksanakan likuidasi terhadap 100 bank: 99 BPR/BPRS; 1 bank umum, dan telah melakukan penyelamatan 1 bank gagal yang dimandatkan oleh KSSK pada tahun 2008. Jumlah klaim penjaminan simpanan bank bayar sampai dengan September 2019 mencapai 1,55 triliun mencakup 237.788 rekening". Nah ini kita mencari data dari sini, dari total bank yang dilikuidasi tersebut, total simpanannya mencapai 1,763 triliun betul Pak ya, sementara 302,35 miliar atau 17,2% ya simpanan yang dinilai layak bayar itu 82,21% 1,460 tadi maaf datanya ya. Jadi dari 1,763 triliun itu yang dinyatakan layak bayar hanya

82,81% atau 1,460 triliun, sementara 302,35 miliar atau 17,2 % sisanya dinyatakan tidak layak bayar, betul ya datanya ya.

Nah berdasarkan keterangan LPS, sebagian besar penyebab nasabah masuk dalam kategori tidak layak bayar adalah: (ini ada di *slide* di halaman delapan ini)

1. Praktek perbankan yang tidak sehat, baik oleh pengurus maupun pemegang saham sehingga kinerja keuangan bank menjadi buruk. Indikasinya ini bank menawarkan suku bunga yang tidak sesuai standar ditetapkan oleh LPS kalau di *slide* nya ini suku bunga itu ditetapkan lebih besar daripada LPS *rate* nya.
2. Kepemilikan kredit macet yang tinggi
3. Data nasabah tidak masuk pembukaan bank

Nah, pertanyaan yang ingin kita LPS menjelaskan, apa langkah antisipatif dan apa langkah evaluasi yang sudah dilakukan oleh LPS untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga apabila terpaksa sampai ada bank yang dilikuidasi, keamanan nasabah tetap bisa terjamin karena kan yang inti adalah bagaimana keamanan nasabah bisa terjamin. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua ini saya perhatian kepada bank-bank kecil ini ya Bapak, Bapak Ibu, sementara industri perbankan kita terus berkembang pesat dengan digitalisasi kemudian ada persaingan suku bunga dan persaingan mendapatkan dana. Harapan kita memang semua bank bisa *survive*. Nah bagaimana dalam pandangan LPS ini terhadap bank-bank kecil yang berpotensi terhimpit tantangan-tantangan di dunia perbankan saat ini dimana industri perbankan sangat cepat gitu, di sisi lain bank-bank kecil harus mencari jalan keluar dengan menambah modal untuk bisa bersaing. Jadi bagaimana perhatian LPS terhadap bank-bank kecil ini.

Nah kemudian yang ketiga ini disampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK itu ada tiga temuan yang memuat lima permasalahan yang terdiri atas tiga permasalahan SPI, dan dua permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangnya diantaranya sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai dan juga SOP belum disusun atau tidak lengkap. Nah ini apa yang sudah dilakukan oleh SPS sebagai respon atas temuan BPK terutama tentang permasalahan SPI baik tentang sistem informasi akuntansi maupun pelaporan yang tidak memadai atau tentang SOP yang belum disusun atau sudah disusun tapi tidak lengkap.

Terakhir, dari kemarin kita rapat dengan Kementerian Keuangan kemudian BPK ini semua menyatakan bahwa ekonomi global memang mengalami perlambatan dan kemudian kebijakan fiskal di AS juga mempengaruhi kita...(suara tidak jelas)...penurunan. Nah yang kita ingin tau ini apa langkah konkret yang dilakukan LPS untuk mengantisipasi terdampaknya Indonesia terhadap resiko krisis tersebut.

Jadi tiga pertanyaan itu mohon penjelasannya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si. /F-P. NASDEM):

Selanjutnya Pak Misbakhun yang terhormat, siap-siap Pak Fauzi.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Terima kasih.

**Pak Ketua dan Pimpinan Komisi XI yang saya hormati,
Rekan-rekan Komisi XI yang saya hormati,
Ketua Dewan Komisiner LPS beserta Komisiner, Pak Fauzi Ichsan sebagai
eksekutif LPS beserta jajaran yang saya hormati.**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya.*

Saya tadi banyak pertanyaan yang sudah menarik yang disampaikan oleh rekan-rekan kami sebelumnya. Tapi saya ingin satu menyoroti, pertama soal cerita pembukaannya Pak. Hari senin itu kita rapat sama Menteri Keuangan, halo halo pembukaannya itu sama Pak, makronya itu bahwa dunia sedang menghadapi krisis dan kita suruh siap-siap menghadapi krisis. Ceritanya sama, ini orkestra orang keuangan ini kok sama semua gitu. Kita ini ditakut-takuti dari zaman tahun saya masuk DPR omongannya sama aja semua. Ini gatau ini IMF, World Bank, sama semua, ini ada apa ini orang keuangan ini, orang sektor keuangan ini apa, gitu loh. Lah ini yang mengagetkan saya gitu loh, selalu ceritanya bahwa siklus krisis itu selalu terjadi dan kita suruh siap-siap, ya dimana-mana dunia ini selalu menghadapi krisis Pak, tetapi bagaimana kita menyiapkan strategi sebagai sebuah negara besar dan menghadapi jangan sampai krisis itu datang sama kita. Saya *ngga* percaya Pak dengan cerita-cerita yang seperti itu karena kita sudah tau lah konsep dan *platter*-anya seperti apa itu akan mereka bangun untuk apa dan untuk kepentingan apa, kalau kita bisa memberikan gambar besarnya. Lah jangan sampai kemudian hal-hal yang seperti itu kemudian menjadi *concern* kita seakan itu menjadi sebuah *mindset* kita ada dalam *mindset* kita. Lebih baik kalau kita nanti itu membicarakan LPS ini ya ada seperti itu sama Pak kalau kita pagi-pagi berangkat ke kantor tiba-tiba mendengarkan radio yang menjelaskan soal lalu lintas dan sebagainya oh disana ada truk terguling nanti akan ada ini ada itu, ya selalu seperti itu, tiap hari itu Pak, dan radio ini kan selalu menyebarkan itu supaya dia kelihatan penting di mata pendengarnya, dan pendengarnya itu butuh informasi itu. Sama kayak IMF Pak,

dunia ini dibikin bergantung sama dia, World Bank juga sama, dan mereka itu bikin orkestra seakan-akan oke kita ini semua ditakut-takutin sama mereka. Lah kepentingan globalnya kan kita tau akan seperti apa mereka bahwa dunia ini dalam perspektif kepentingan mereka.

Saya ingin menyampaikan soal LPS, LPS ini kan bagian dari KSSK Pak, bagian dari KSSK dan di undang-undang PPKSK itu jelas bahwa perannya LPS itu seperti apa. *The Lender of the Last Resort* kalau kita menghadapi krisis ya pertama kali suruh pasang badan ya LPS Pak, pasang badan. Tadi ada teman-teman yang sudah mulai bicara soal kewenangan LPS, soal kewenangan LPS dan undang-undang LPS, Undang-Undang 24 tahun 2004 ini memang sudah saatnya harus direvisi Pak, lebih baik dengan kondisi yang ada dan situasi yang seperti ini LPS menurut saya menyiapkan Pak karena ini periode awal kita. Desain undang-undang LPS yang kedepan seperti apa disesuaikan dengan protokol krisis yang kita miliki di undang-undang PPKSK. Undang-undang PPKSK ini kan memberikan kewenangan yang terbatas kepada LPS karena kita memakai sudah tidak lagi *bail-out* tapi kita memakai sistem *bail-in*. Lah posisi *online* nya ini kan pemegang saham di dalam sistem perbankan kita. Lah ini kan yang harus disesuaikan oleh LPS.

Udahlah Pak serahkan kepada para penguasa-penguasa di KSSK itu bicara makronya bicara *bang bing bung* di langitnya itu biarin ajalah mereka, sebagai operator penjaminan ya Bapak bicara itu. Apa yang akan menjadi penjaminan yang ideal, ya Bapak kan sudah punya asosiasi LPS sedunia, berbicara tentang *the best practice* bagaimana menangani pengelolaan LPS dengan pengalaman-pengalamannya. Lah inilah kalau menurut saya itu, karena apa kalau kita bicara krisis Pak, Amerika kena krisis belum tentu Asia kena krisis, Asia kena krisis yang menikmati Amerika, jadi begitu. Dan dalam sejarah ceritanya itu World Bank IMF itu kan tidak pernah mempunyai *success story* yang benar-benar ideal yang bisa diterapkan pada sebuah negara.

Jadi kalau kita memang ingin menjadi bagian dari negara yang berdaulat dan mandiri, ya pikiran dan cara kita berpikir juga berdaulat dan mandiri, gitu. Lah inilah yang harus menjadi konsep kita mengembangkan organisasi LPS ini. Dan jangan sampai kemudian ada *inferiority syndrome complex* di dalam sektor keuangan kita seakan-akan kalau gak ngutip IMF gak ngutip World Bank gak ngutip apa itu kita gak kelihatan hebat gitu. Jangan, inilah yang ingin saya luruskan di para pengelola sektor keuangan kita, lah di LPS ini yang paling utama Pak. Saya melihat ada satu titik lemah yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh LPS dalam pengelolaan sekitar 118,7 triliun yang Bapak punya. Apa? yaitu pengelolaan dana simpanan ini, karena apa? Disana Bapak cuma menyimpan dalam instrumen-instrumen yang ada di dalam negeri. Coba kalau kita bicara krisis, kita bicara krisis ini, kalau seandainya ada krisis, yang pertama kali diserang oleh krisis itu adalah negara, dan ketidakpercayaan orang kepada negara itu kemudian menurunkan semua *rating credit rating* mereka, sementara yang dipunyai oleh LPS itu surat utang terhadap pemerintah Republik Indonesia, langsung *approve*, siapa yang mau beli kalau Bapak mau jual, siapa yang mau beli.

Harusnya kan kemudian kita mulai berpikir perlu LPS itu memegang misalnya *treasury bill*-nya pemerintah Amerika, pemerintah Tiongkok, *European Bonds*, sentral banknya, kemudian pemerintah Jepang, sehingga apa kita bisa mendiversifikasi resikonya, karena apa? Dalam secara teorinya kalau kita bicara dalam sejarah krisis, selalu spot-spotnya itu berbeda-beda. Tahun 1928-30 Amerika yang kena, *the first great...*(suara tidak jelas)...itu ada disana, kemudian 97-98 Asia yang kena, moneterinya yang mereka sikat, kemudian 2008 *mortgage*-nya Amerika yang kena, dan semuanya itu kan spektrumnya epicentrumnya berubah-ubah, yang belum kena ini kan China yang belum kena dalam sejarah krisis China yang belum pernah. Lah kita ini kan harus tau melindungi ini, lah inilah yang harus disiapkan dan Bapak datang kepada DPR ini sampaikan “Pak kita ada titik lemah organisasi kita disini dalam menjaga sistem keuangan kita sebagai penjaminan dan kita butuh *support* politiknya ini”, itu Pak. Karena kita akan mempunyai resiko dan saya mengharapkan nanti dengan 111 bank ini Indonesia terlalu kebanyakan bank, kalau Bapak-Bapak menyusun undang-undang perbankan, tolong ini dipangkas caranya dari sini dari sini dari sini. Misalnya contoh bank umum modalnya dinaikin dari 15 jadi 15 triliun, kalau bank devisa jadi 25 triliun, itu langsung merger secara otomatis sehingga tugas kami menjadi sangat ringan, untuk melindungi bank-bank kecil kita perlu BPR-BPR yang kuat, kita siapkan infrastruktur aturannya harus seperti ini, itu Pak kita bermain dalam ide dan gagasan bagaimana sektor keuangan ini menjadi sangat kuat, LPS-nya kuat, sinergi antara LPS dengan lembaga politiknya menjadi kuat karena apa? Setiap pengambilan keputusan itu Bapak perlu tataan hukum dan tataan dukungan politiknya, ini yang lebih penting Pak, gitu.

Lah inilah kalau menurut saya ada *ex-officionya* BI, kebetulan Pak Heru Kristiyana ...(suara tidak jelas) datang, dan inilah yang harus kita mainkan Pak sirkulernya, jangan kemudian Bapak hidup dalam sebuah ...(suara tidak jelas) sementara ceritanya menghadapi tantangan yang terus berubah. Kalau Bapak hidup dalam ...(suara tidak jelas) terus langitnya tiap hari sambar petir sambar gleded dan sebagainya Bapak menyiapkan rumahnya atapnya bocor cuma rumah Bapak talangin begitu saja bocor disini tidak seperti itu Pak. Kalau perlu kita bangun rumah baru, konstruksinya yang lebih kuat menghadapi perubahan iklim yang seperti itu tahan dengan seperti apa. Lah inilah yang harus kita siapkan, ide besar kita terhadap LPS itu apa kedepan menghadapi dunia yang *circumstances*-nya yang tidak bisa kontrol seperti itu. Lah inilah kalau menurut saya, saya cuman bisa memberikan pemikiran ini kedepan.

Berikutnya saya ingin menyampaikan Pak, BPR ini tolong benar-benar diawasi Pak karena Bapak paling banyak ini nutup BPR. Saya ingin mengatakan bahwa soal Bapak-Bapak ini kan orang keuangan kalau urusan *governance* di LPS saya *ndak* ingin bertanya Pak, tolong BPR ini diawasi karena apa? Saya tau BPR ini adalah banknya rakyat kecil, rakyat kecil itu kalau mau ke bank umum gak mampu ya paling ke BPR. Lah kalau nutup BPR dan sebagainya jangan sampai kemudian yang mendapatkan rugi itu para nasabah yang rakyat kecil ini, tolong itu benar-benar dijaga karena saya mendengar paling sering ditutup oleh LPS ini kan adalah BPR,

paling banyak, dan saya sebenarnya juga sebenarnya kalau disuruh memuji ya cara menutup LPS menutup BPR ini juga sangat bagus saya lihat skemanya. Nah tolong ini dipertahankan kalau perlu ditingkatkan Pak dan pengawasan terhadap BPR ini harus terus dilakukan ya terutama dengan OJK sehingga itu, terus yang berikutnya saya ingin satu Pak tambahan, LPS ini sepertinya perlu punya kantor-kantor regional Pak untuk menjaga koordinasi dengan OJK, BI, di daerah-daerah tertentu Pak mungkin satu pulau satu, di wilayah timur satu, dan sebagainya, sehingga semua permasalahan tidak harus diselesaikan di Jakarta, ini masalah operasional aja Pak sedikit aja.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Misbakhun.

Selanjutnya Pak Fauzi Amro tadi dilewatkan, oh Pak Andreas dulu silahkan Pak Andreas. Pak Andreas silakan Pak Andreas, setelah itu Pak Rudi ya, Pak Amro baru di, ya ya oke. Silakan-silakan Pak.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Baik.

Pertama memang saya menyadari posisi LPS karena kalau menyangkut industri keuangan itu kalau secara terbuka itu memang sangat berhati-hati karena itu sebetulnya nanti perlu kita pikirkan ada juga hal-hal yang mungkin perlu disampaikan secara tertutup ya. Namun demikian saya terpaksa sedikit ya ingin menyinggung masalah *assessment* LPS terhadap industri perbankan kita, tadi di-*summary*-kan di halaman empat, karena sebetulnya konsepnya LPS itu harusnya *hope for the best but prepare for the worse*, ini yang harusnya itu yang dipake ya karena Bapak akan menghadapi tadi dalam kondisi yang *the worse* itu apa yang perlu disiapkan. Kalau saya lihat disebutkan disitu rata-rata ...(suara tidak jelas) itu seakan-akan kuat industri perbankan kita, tapi tolong disampaikan posisinya per Buku karena kita tau bahwa sebetulnya kalau Buku 4 kita percaya kuat, tapi Buku 2 dan 3 ini yang sebetulnya di dalam banyak hal ini yang menimbulkan pertanyaan, saya kira Pak Erwin tau persis posisi ini ya.

Terus yang kedua adalah masalah resiko kredit. Saya tau kalau di dalam paparan ini resiko kreditnya meningkat dan kita baru saja di akhir September saya kira Bapak-Bapak dan di LPS sudah membaca laporan dari ...(suara tidak jelas) yang menyatakan bahwa korporasi di Indonesia termasuk ...(suara tidak jelas) dan potensi gagal bayarnya kalau kondisi perekonomian semakin melemah itu potensi gagal bayarnya termasuk yang relatif tinggi, dan itu sebetulnya angka ini kalau menurut saya *real assessment*-nya LPS apakah sudah betul-betul angka yang ini

atau sebetulnya saya kira dengan *assessment*-nya LPS pasti tau sebetulnya yang kondisi sebenarnya. Kemudian disebutkan *Loan-to-Deposit Ratio* cenderung stabil tapi kemudian ini dihubungkan dengan menunjukkan bahwa kegiatan intermediasi perbankan tetap tumbuh padahal disini menunjukkan bahwa sebetulnya...(suara tidak jelas)...meningkat. Kita tau di perbankan kalau LDR-nya udah mencapai diatas 90% itu *signal*-nya sebetulnya sudah lampu kuningnya udah dilewat itu ya, artinya disini sebetulnya resiko likuiditas meningkat, bagaimana *assessment* LPS terhadap meningkatnya resiko likuiditas ini, dan kedepannya gimana sehingga secara *overall* saya hanya mengingatkan saja apakah Indonesia ini memang imun terhadap gejolak ekonomi ini. McKinsey baru saja menyampaikan laporan dan saya kira juga pasti Pak Halim maupun ...(suara tidak jelas) juga mengikuti, separuh bank di dunia adalah dalam kondisi yang lemah, bahkan sebelum krisis. Itu kan McKinsey ada laporannya itu.

Saya membayangkan bank di kita ini terutama yang kondisi Buku 2 dan tiga, ini atau terutama yang di tiga ini, dan kalau seperti demikian sebetulnya apa preventifnya atau langkah-langkah preventif yang dilakukan untuk supaya kita tidak masuk di dalam krisis ini. Jadi saya sebetulnya menginginkan LPS lebih dalam posisi yang tadi, *hope for the best but prepare for the worse*, analisis ini semua yang kita inginkan ya.

Terus yang kedua mengenai, kita tau bahwa untuk rencana kerja ini memang agak dari segi tata kelola kalau Bank Indonesia dan OJK itu kan jelas, yang menyetujui rencana kerja dan anggarannya adalah DPR dalam hal ini Komisi XI. LPS ini memang yang menyetujui anggaran ini siapa sama rencana kerjanya? Dewan Komisioner kan? jadi *within* di dalam mereka sendiri. Nah ini sebetulnya dari segi tata kelola juga ini hal yang perlu segera kita selesaikan gitu karena kalau yang menyetujui itu mereka sendiri ya gimana. Ini hal yang memang dari segi tata kelola perlu ini, jadi kalau hanya dilaporkan kita tapi sebetulnya rencana kerjanya ini kan sebetulnya mereka sendiri yang bikin, mereka yang juga menyetujui dan mereka sendiri yang kemudian menetapkan, ini perlu kita segera pikirkan dalam jangka pendek ini.

Terus yang kedua adalah bahwa salah satu tugas LPS di dalam undang-undang PPKSK itu adalah LPS diberikan tugas untuk melakukan restrukturisasi perbankan. Nah tadi disebutkan kalau kita lihat kan total asetnya LPS kan 130 T ya, dan kita tau seandainya bank menengah aja yang bermasalah itu udah habis itu, karena itu sebetulnya LPS harusnya menyampaikan kepada kita berdasarkan *assessment* LPS berapa sih sebetulnya *sufficient funds* untuk kalau seandainya ada ...(suara tidak jelas) tadi yang ditutupnya kebanyakan BPR yang kecil-kecil ini, tapi kita bayangin aja kalau bank menengah yang tadi saya mengatakan Buku 2 dan 3 ini ada masalah gak dihukum 130 T. Sehingga ini perlu disampaikan bahwa, dan kita kan gak bisa hanya industri sekarang sudah ...(suara tidak jelas) berkali-kali ngomong "ya kita ditarikin aja iuran, tetapi apakah uang itu bisa dipakai nanti kalau ada terjadi benar-benar masalah". Dan ternyata saya barusan disampaikan data oleh mereka ternyata *cost* ...(suara tidak jelas) kita itu tinggi banget dibandingin,

makanya ini yang menurunkan daya saing kita.

Jadi iuran yang diserahkan oleh industri kepada LPS dan OJK itu hampir mencapai 10% dari profit mereka, yang dulunya gapernah ada ini karena dulu kan pengawasan perbankan ada di Bank Indonesia gak ditarik ya kemudian sekarang mereka harus bayar premi. Nah dalam hal ini memang sebetulnya pertanyaan yang mendasar adalah sejauh mana LPS ini bisa masuk ke dalam apakah bank itu harus dinyatakan gagal dulu baru bisa diselamatkan oleh LPS atau sebelumnya bisa, kita taulah saya gak bisa sebut nama bank tapi Pak Erwin pasti ketawa-ketawa ada bank yang sudah sejak tiga tahun yang lalu masih ngambang gitu ya nah ini kalau dibiarkan apakah kemudian LPS bisa masuk. Kalau harus gagal dulu ya konsep *bridge bank good bank* segalamacam ini gak akan berjalan. Nah karena itu sebetulnya payung undang-undang apa atau payung hukum apa yang diperlukan LPS untuk bisa melakukan itu, dan sejauh mana premi mengenai dana restrukturisasi perbankan yang waktu itu pernah diusulkan oleh LPS dan itu adalah merupakan konsekuensi dari program restrukturisasi perbankan, saya dengar industri juga pada dalam tanda kutip keberatan untuk hal ini tetapi kalau tidak berarti usulan apa yang bisa dilakukan karena kalau itu terjadi padahal dananya tidak cukup berarti apa yang akan dilakukan oleh LPS untuk itu ya karena jelas sekali di dalam undang-undang PPKSK program restrukturisasi perbankan itu dimandatkan kepada LPS tetapi payung hukumnya saya kira kalau itu terjadi, Bapak-Bapak yang di depan ini tidak akan berani melakukannya karena tadi istilahnya itu payung hukum yang ada di dalam undang-undang sekarang ini di undang-undang PPKSK-nya ada tetapi di undang-undang LPS-nya itu tidak cukup untuk melindungi LPS kalau melakukan hal ini, hal-hal ini sebetulnya yang perlu diangkat.

Terus yang berikutnya adalah kita tau juga bahwa LPS sekarang hanya menangani masalah penjaminan untuk dana simpanan bank. Kita tau di dalam undang-undang asuransi itu sudah habis waktunya harusnya dua tahun yang lalu itu pemerintah sudah harus punya penjaminan asuransi. Bagaimana pandangan LPS mengenai hal ini, apakah LPS kalau ditugaskan itu apa syaratnya dan seterusnya dan pandangan ini karena kita apakah nanti mau membentuk lembaga penjaminan simpanan sendiri untuk asuransi atau LPS-nya yang kita kemudian tambahkan disitu, ini sangat krusial karena Ibu Bapak tau ya salah satu yang disampaikan juga oleh dan kita sampaikan juga berkali-kali kepada ketua KPK dan kemudian juga disampaikan lagi oleh World Bank bahwa kita ini salah satu yang punya potensi untuk dalam tata sistem keuangan kita ini adalah dua perusahaan asuransi yang saat ini gagal bayar.

Nah jadi di undang-undang asuransinya sudah mensyaratkan itu dan sudah lewat, jadi seharusnya itu sudah terbentuk namanya penjaminan untuk polis asuransi ini, sudah lewat waktunya tapi ini sudah lewat dan belum ada, pertanyaannya adalah nanti mau ditempatkan dimana ini kalau kita mau menjalankan undang-undang ini karena itu dimandatkan oleh undang-undang asuransi, ini hal yang sangat penting dan tadi saya lihat di dalam rencana kerja itu adalah penyiapan infrastruktur untuk program restrukturisasi perbankannya, tetapi

sebelum itu dilakukan yang paling penting menurut saya payung hukum apa dulu ini, karena kalau ini disiapkan tetapi kemudian payung hukumnya gak ada kan ya bukan ini, pasti pada saat terjadi nanti akan saling lempar-lemparan gitu ya sehingga ini dan kami tau sekali bahwa sebetulnya apalagi dengan pengalaman-pengalaman yang ada di dalam penanganan krisis keuangan itu pasti untuk pengambil keputusan itu akan paling akan berusaha untuk menghindari lah di dalam pengambilan putusan tapi itu akan dalam masa krisis akan membuat krisis itu betul-betul malah akan terjadi. Jadi ini hal-hal terutama tadi payung hukum yang apa yang perlu disiapkan karena kita ini kan *law maker*, kita ini pembuat undang-undang gitu ya.

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Selanjutnya Pak Fauzi. Setelah itu Pak Rudi.

F-P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Fauzi, pertanyaan pendahulu sudah banyak jadi saya menekankan beberapa poin saja Pak.

Yang pertama bahwa keberadaan LPS ini sudah hampir 16 tahun, saya baca-baca bahwa gejala utama adalah penutupan 16 bank, itu asal muasalnya. Ada dua yang menjadi fungsi tupoksi daripada LPS yaitu menjamin simpanan nasabah dan kedua memelihara stabilitas sistem perbankan. Nah dari dua tupoksi pokok tadi, saya pengen mengingatkan lagi bahwa seorang nasabah itu akan merasa nyaman apabila ada stempel LPS di bank-bank itu, kalau kita orang islam ini Pak Ketua makan itu enak kalau ada standar halalnya kira-kira kayak gitu lah, ya mas Fathan ya, Fathan itu susah kalau makan diluar Pak, harus roti terus. Nah itu yang saya simak seperti itu Pak, kalau ada stempel LPS-nya orang akan ada rasa nyaman, itu yang pertama.

Yang kedua, otomatis kenyamanan itu tadi bisa dilihat beberapa aturan main Pak, aturan main yang sudah ditaati oleh suatu bank, aturan main yang sudah ditaati oleh BPR, sehingga ada kesan nasabah itu merasa nyaman, seperti itu Pak. Nah apa yang disampaikan Pak Andreas tadi memang kekusaran di tengah masyarakat yang sekarang ini beberapa asuransi Pak, mungkin ada kawan-kawan atau keluarga kita jadi korban itu luar biasa, Bumiputera seperti itu nanti kita akan raker juga dengan Bumiputera. Nah ketika di awalnya ada proses kenyamanan tapi tiba-tiba tidak ada *warning system* Pak, mengingatkan kita bahwa "oh ini bahaya" "oh ini *enggga* bahaya" dengan 1800 bank yang ditangani oleh ...(suara tidak jelas) yang

ditangani oleh LPS ini luar biasa besarnya begitu Pak. Nah saya pengen *men-stressing* Pak bahwa ada sistem yang diekspos oleh LPS “oh ini bank ini aman, bank ini sehat” itu apa per enam bulan apa per triwulan seperti itu Pak, sehingga ada jaminan nasabah itu Pak Ketua ...(suara tidak jelas) seperti itu ketika berhubungan dengan bank umum, bank syariah, maupun BPR, sehingga tidak ada was-was seperti itu Pak.

Nah saya gak tau persis kenapa Bumiputera sampai sekarang mungkin udah dua tahun sampai tiga tahun sehingga sampai hari ini pun bisa menarik premi-premi asuransi ditengah-tengah masyarakat padahal ini tinggal bom waktu menurut saya Pak Ketua ini akan berdampak sistemik tentang asuransi jiwa ini.

Nah saya *entry point* nya seperti itu Pak Ketua mengingatkan supaya LPS ini dengan stempelnya ini bisa memberikan rasa nyaman di tengah-tengah kehadiran bank, seluruh bank hampir 1800 bank yang ditangani baik bank umum bank syariah maupun BPR yang ditangani oleh LPS.

Terima kasih Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya Pak Rudi, Rudi Hartono.

F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Terima kasih Ketua.

Sebenarnya sudah pada ditanya tadi, *eh* pada sudah di apa, dipertanyakan tentang asuransi tadi. Iya diborong, tapi *gapapa* saya sedikit aja.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua dan anggota,
Yang saya hormati Pimpinan LPS, ada Pak Halim, Pak Erwin, Pak Fauzi, dan yang baru saya belum kenal nanti kenalan Pak.**

Baik, tadi ini saya ingin saya sebagai wakil rakyat ceritanya, jadi saya dapat aspirasi nih. Udah udah, udah kenal. Jadi banyak rakyat yang saya wakili kan menanyakan Pak, kami ini nasabah asuransi ...(suara tidak jelas) siapa yang jamin kami, gitu. Tadi Pak Andreas sama Pak Fauzi kan. Jadi termasuk ada yang Bumiputera Pak, ketika mereka sudah jatuh klaim ditagih lama Pak, ...(suara tidak jelas) tidak pernah dibayar. Jadi yang mau saya ingin tanyakan, saya kan ingat dulu kita 2016 pernah membuat undang-undang KKSK ya Pak Halim ya? PPKSK jadinya, dengan Pak Suahasil juga ya. Jadi saya waktu membuat undang-undang itu saya ngingatkan Pak, kenapa asuransi ini tidak dimasukkan ke sistem undang-undang ini

penjaminan ini, kenapa dibiarkan apakah mereka bukan industri keuangan. Jadi saya takut, kan ini seperti yang terjadi Bumiputera, akhirnya ...(suara tidak jelas) ini Pak, gitu.

Jadi saya ingin meminta kepada Pak Halim dan kawan-kawan kiranya bisa mengajukan lagi Pak, Bapak bagian dari penyelenggara negara di bagian penjamin simpanan gitu, kenapa gak dipikirkan itu gitu. Nah itu, saya ingin ngingatkan itu Pak karena jutaan nasabah Pak, Bumiputera dan mungkin ntah Bumiputera yang lainnya gitu. Itu Pak, Pak Halim yang utama, karena banyak rakyat yang saya wakili Pak bertanya.

Kemudian yang terakhir Pak, saya ingin bertanya uang yang di iuran yang diambil oleh LPS ini dimana ditempatkan. Kemudian dikelola sebagaimana, bagaimana bunganya atautkah dijadikan investasi lagi, kami tolong jelaskan Pak. Kalau OJK narik iuran 0,4 habis operasional, LPS kan iurannya disimpan Pak, dana untuk operasional berapa, ini SDM berapa, tolong jelaskan Pak. Nah itulah gunanya kita disini saling rapat kerja Pak.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak, Ibu Siti ada? Sebentar Bu ya sebentar, Pak Heri dulu karena Ibu baru datang tadi. Pak Heri Gunawan silakan. Setelah itu Bu Siti.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Baik terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi XI yang saya hormati,
Pak Halim beserta jajaran.**

Hari ini dan beberapa waktu kebelakang ini saya agak sedikit semangat Pak untuk rapat karena kayaknya kembali Komisi XI ini kembali ke khitahnya gitu loh Pak. Semenjak, ya kami berharap ketua ini solid semua sehingga kami jadi turut bersemangat gitu Pak Halim.

Pak Halim beserta jajaran yang saya hormati.

Tadi sempat disinggung terkait masalah ekonomi makro dan stabilitas keuangan kita. Rata-rata orang berbicara pengaruh global gitu, tanpa kita sadari seharusnya juga pengaruh secara nasional dan internal kita pun pastinya ada pengaruh disana. Apalagi sempat disampaikan di Pak Halim bahwa neraca perdagangan kita masih relatif defisit terus, gitu loh Pak. Yang pasti sebagai tugasnya, salah satu anggota dari KSSK, kalau kita melihat dari paparan poin enam

yang disampaikan di halaman enam, beberapa kali kalau kita berbicara dengan LPS rata-rata berbicara tentang jumlah bank peserta penjaminan dan pertumbuhan simpanan masyarakat. Tapi kali pertama ini saya masih belum melihat seberapa besar ataupun seberapa tinggi, seberapa banyak datanya terkait masalah pertumbuhan simpanan masyarakat itu sendiri, karena yang disampaikan disini hanya penjaminan simpanan, rincian bank peserta, serta cakupan penjaminan begitu loh Pak Halim. Kenapa ini kami perlukan, karena kita ingin melihat apakah terjadi perlambatan pertumbuhan simpanan masyarakat itu sendiri begitu loh Pak. Nah ini kami belum lihat datanya dari yang disampaikan oleh LPS.

Ini tentunya berkaitan erat kenapa saya berbicara seperti ini, di satu sisi ada yang namanya perlemahan pertumbuhan ataupun catatan tertentu tentang BPR di satu sisi, tapi di sisi yang lain kalau kita melihat mungkin nyaris setiap hari kawan-kawan kita yang ada disini atau mungkin staf kita itu mendapatkan sms tentang tekpin (Teknologi Pinjaman), teknologi apa namanya fintek (*financial technology*), setiap hari itu mendapatkan pinjaman. Maksud saya, inikan tentunya akan menggerus pasar BPR kita, kita gak lihat nih kondisi pertumbuhan simpanan masyarakat yang tercatat di LPS seperti apa, apakah uang ini larinya ke tekfin atukah kemana begitu loh kita belum lihat disini. Karena jangan sampai juga ini menjadikan menjadi perubahan perilaku dari masyarakat kita yang tadinya mudah mengakses BPR sekarang karena ada tekfin lari ke tekfin begitu loh.

Nah ini saya belum melihat seperti apa ataupun mitigasi yang dilakukan oleh LPS seperti apa begitu loh Pak, karena kita berbicara seperti disini terkait dengan masalah rencana kerja ataupun evaluasi kerja yang sudah dilakukan oleh LPS. Saya pikir mungkin hanya sebatas itu karena saya hanya ingin melihat secara lebih dalam terkait masalah adakah hubungan yang signifikan antara mundurnya ataupun banyaknya permasalahan dengan BPR terkait dengan masalah tekfin. Padahal kita kan ketahui bersama kalau toh tekfin ataupun anggaplah itu fintek menarik dana dari masyarakat, walaupun apapun namanya seperti *e-money* dan lain sebagainya, kita kan menyimpan uang mereka menarik dana langsung ke masyarakat. Sementara patut kita ketahui menurut undang-undang yang berhak melakukan itu adalah perbankan. Nah ini selaku Lembaga Penjamin Simpanan tentunya bisa bantu melihat juga seperti apa kronologis ataupun hal-hal seperti ini.

Hal yang kedua mungkin Pak Halim beserta jajaran yang ingin saya coba tanyakan. Kita ketahui bersama dengan adanya perang dagang antara China dan Amerika, ada beberapa perusahaan yang henggang dari China, tetapi kita tidak mendapatkan manfaat dari itu, yang mendapatkan manfaat malah Vietnam dan lain sebagainya. Saya yakin seyakin-yakinnya ada penekanan bahkan sudah disampaikan oleh Bank Dunia sendiri kepada Pak Jokowi bahwa di Indonesia iklim investasinya tidak mendukung termasuk dengan kepastian hukumnya.

Akhirnya pemerintah melakukan sebuah terobosan rencananya akan membuat *Omnibus Law*, penggabungan antara kurang lebih ada 72 yang sekarang baru kita sasar ada 72 undang-undang ataupun aturan yang harus digabung dijadikan jadi satu. Apa hubungannya dengan Lembaga Penjamin Simpanan?

Dengan LPS, tentunya ini akan berpengaruh karena investasi yang masuk siapa yang akan menangkapnya, apakah dengan *Omnibus Law* itu akankah secara signifikan memberikan dampak untuk pertumbuhan ekonomi kita. Pemerintah mengatakan SDM kita SDM unggul, tetapi dalam praktek pembicaraannya yang disampaikan oleh Pak Presiden itu hanya berbicara terkait masalah investasi, tidak berbicara tentang pekerja, padahal investasi itu sendiri pasti akan ada hubungannya dengan masalah pekerjaan. Nah ini juga kita ketahui bersama karena kalau berbicara tentang perbankan itu sudah jelas ada yang namanya kriterianya, ada yang namanya uji kompetensinya, tapikah apakah itu masuk kriteria itu dibanding dengan nanti undang-undang yang akan kita gabungkan begitu loh. Saya ingin melihat segi pandang yang lebih jauh dari LPS.

Kurang lebih mungkin demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya Bu Siti silakan.

F-PD (Hj. SITI MUFATTAHAH, Psi.):

Baik terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan oleh rekan-rekan ini sangat strategis sekali jadi tolong benar-benar dicatat dan dicarikan solusinya nantinya sehingga kita bisa kedepannya ini bersama-sama melangkah berlari bukan hanya berjalan atau bahkan merangkak, mari kita sama-sama berlari.

Nah yang ingin saya *stressing* disini saya pertegas dari apa yang disampaikan oleh beberapa teman yang tadi saya poin yang paling saya krusial untuk diingatkan adalah itu penyelesaian bank-bank itu Pak tolong dijadikan utama prioritas sehingga penyelesaiannya menjadi baik dan kita kedepannya perbankan sektor perbankan menjadi lebih baik.

Terus yang kedua berkaitan dengan kredit itu tadi. Saya setuju jika ini menjadi wacana pemikiran Bapak dan Ibu sekalian di LPS mungkin bersama pemerintah nanti kita juga akan mendukung kalau itu memang baik dan ada cara celah yang akan dilakukan bersama antara pemerintah dengan DPR kita bisa lakukan bersama-sama menyelesaikan masalah kredit itu tadi. Jadi artinya sampai sekarang ini kan belum ada lembaga penjamin kredit. Nah kalau bisa ini ditangani ya syukur *alhamdulillah* nanti mungkin kredit-kredit *eh* asuransi bukan maaf, asuransi maaf maksud saya. Berkaitan dengan asuransi tadi, karena lembaga asuransi ini berjamuran sekarang marak di masyarakat. Nah ini tolong diperhatikan siapataupun ada terobosan untuk menyelesaikan masalah-masalah asuransi yang saat ini marak baik

itu asuransi jiwa dan asuransi yang lainnya.

Terus yang ketiga, yang paling menurut saya penting dan kalau berkaitan dengan penguatan lembaga oke saya setuju dengan rekan-rekan yang lain baik undang-undang dan lain sebagainya itu perlu dikuatkan. Tapi yang paling utama Bapak dan Ibu yang dari LPS ini mohon diperhatikan berkaitan dengan kinerjanya, kinerja ini akan berasa tolak ukurnya itu apa berasa seperti apa, nah kinerja tolak ukur ini yang harus diperhatikan dimana kalau menurut saya secara orang awam saja yang jelas masyarakat itu belum paham tentang LPS ini secara keseluruhan terutama masyarakat di pedalaman, kalau masyarakat di kota saya tidak bicara karena mereka sudah paham berkaitan dengan lembaga LPS ini sudah lama. Tapi masyarakat yang di pedalaman itu masih sangat-sangat minim pengetahuannya tentang LPS bahkan contoh saja kemarin beberapa kali saya melakukan sosialisasi bersama LPS di kota termasuk sudah termasuk di kota tapi masih banyak sekali yang tidak paham, pertanyaan sangat antusias apa itu barang apa itu LPS. Artinya LPS sampai saat ini juga target sasaran kerja startegisnya belum menyinggung masalah sosialisasi. Jangan sampai begini Bapak dan Ibu, LPS ini kan sangat luar biasa *marwah*-nya bagus sekali sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya kita harapkan semaksimal mungkin menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbankan ini, merasa nyaman aman jika menabung. Jangan sampai kita merasa dibutuhkan sehingga kita duduk manis menunggu orang yang mau daftar, kalau bisa ini jemput bola, jadi kita yang mencari bank mana nih yang harus kita jamin atau BPR mana yang harus kita jamin, jangan menunggu BPR mendaftar ke kita “nih saya pengen dijamin” begitu, kalau bisa kita yang jemput bola, selain Bapak melakukan sosialisasi ke perbankan-perbankan ataupun kepada masyarakat sebenarnya bagus juga agar masyarakat ini kalau ingin membuat BPR juga harus bekerja sama dengan LPS.

Nah intinya dalam hal ini saya berharap sekali LPS ini betul-betul hadir di masyarakat, di pedalaman, jangan hanya menggunakan sosialisasi yang saya pernah lihat di iklan itu LPS hanya sepintas saja mungkin seberapa detik apa namanya itu sosialisasinya atau iklanya. Itu orang yang menonton juga jarang terus saya juga jarang nonton tv juga gitu ya. Jadi artinya efektivitas dari iklan itu untuk sosialisasi LPS ini agar masyarakat ini paham tentang adanya LPS dan merasa nyaman dan aman, aman terhadap mereka menabung di bank, ini perlu diperhatikan Bapak.

Jadi intinya itu sosialisasi harus digalakkan, sosialisasi langsung ke masyarakat bukan hanya media-media saja, media kalau perlu dikurangi media, jadi masukkan langsung ke sosialisasi kepada masyarakat, libatkan teman-teman sekalian di Komisi XI ini karena kami ini memiliki dapil, memiliki daerah yang paham tentang masyarakat kami dimana masyarakat itu contoh saja di daerah saya saya Garut dan Tasik ini banyak UMKM, saya tanya ke mereka, mereka uangnya dimana, tidak banyak yang bekerja sama dengan bank, tidak banyak, langsung mereka tidak nyimpan di bank gitu uangnya itu, kan sayang sekali, ini adalah target Bapak sebenarnya, target Bapak kalau semakin banyak premi yang Bapak ini berarti

kepercayaan masyarakat kan semakin baik terhadap perbankan kita.

Nah harapan saya kedepannya tolong diperhatikan untuk rencana kerja strategis kedepannya masukkan sosialisasi, bukan hanya sekedar infrastruktur dan lain sebagainya yang berkaitan dengan internal BPS saja, tapi bagaimana kinerja itu dicapai dengan cara memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa mereka menabung itu aman nyaman dan dijamin ada penjaminnya, nah ini belum paham masyarakat secara keseluruhan.

Mungkin itu yang perlu diperhatikan, anggarkan sendiri untuk sosialisasi ini karena saya yakin itu tidak mengurangi malah justru membantu kinerja Bapak dan Ibu yang berada di LPS, lembaga, kan membantu kinerja lembaga LPS ini.

Mungkin itu yang ingin saya sampaikan Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya mba Puteri dulu, mba apa ibu? mba Puteri, adek, anggota DPR termuda di Komisi XI. Mba Puteri setelah itu Pak Jon ya. Bu Indah juga?

F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDDIN, B.Com.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih kakak-kakak Pimpinan, om? Hehe.

Pak Halim dan beserta jajaran Pimpinan LPS yang lainnya.

Saya ingin izin menanyakan tentang perang suku bunga yang sekarang sedang terjadi di perbankan kita karena kita tau 50% dari struktur perbankan di Indonesia itu terdiri dari bank Buku 3 yang modal intinya 5-30 triliun, sementara pengetatan likuiditas sepanjang tahun ini telah menyebabkan perang dana yang akhirnya menyebabkan margin bunga bersih juga menjadi tertekan. Sementara 70% dari pendapatan suatu bank itu adalah *mostly* margin bunga bersih seperti yang kita tau, dan sedikit bank yang sekarang bisa mendiversifikasi pendapatannya terutama karena persaingan dengan fintek yang tadi sudah dibicarakan oleh senior-senior saya juga.

Jadi sebagai salah satu dari anggota dari komite KSSK, bagaimana pandangan Bapak-Bapak di LPS terkait dengan perang suku bunga ini karena banyak juga dari data yang sudah dipaparkan tadi, tidak layar bayar itu karena bunga diatas dari LPS *rate* itu ...(suara tidak jelas) dari total nominal TLB. Jadi kami

hanya ingin menitipkan terkait dengan bagaimana analisa kedepannya sehingga nantinya perang suku bunga ini tidak akan memperkeruh keadaan ketika dimana kondisi keuangan dunia sudah sampai ke Indonesia.

Sekian dari saya.

Terima kasih banyak.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Pimpinan dan dewan-dewan anggota Komisi XI DPR RI,
Bapak-Bapak LPS lengkap seperti nya.**

Saya langsung saja Pak, tadi agak mengutip yang disampaikan Pak Misbakhun banyak sekali info-info dari luar yang kita serap. Info itu selalu dijadikan kambing hitam, sebenarnya yang kita serap itu kita harus sampaikan langkah-langkah yang akan kita kerjakan nanti. Kita bicara Bappenas, bicara BPS, bicara Bank Indonesia, ini Pak Erwin juga ada, bicara OJK, semua sama. Nah yang lucunya hari ini, saya baca nih barusan baca juga sama nih yang disampaikan, saya langsung Pak Misbakhun bilang tadi, tapi Bapak-Bapak mungkin lupa *update* ini Pak karena per hari ini juga tren ekonomi dunia itu agak berbalik gitu loh karena perang dagang itu sudah mau ada pertemuan yang baik gitu. Jadi kalau data yang kemarin dibawa terus ke kita, kita juga terlambat juga meresponnya gitu loh.

Kemudian *brexit* juga sudah mulai sejuk gitu, nah ini hal-hal yang memang harusnya kita merespon atau *update*-nya itu memang cepat gitu. Mungkin setengah jam sebelum kesini juga itu harus ada *update* juga ke kita karena nanti supaya informasi yang kami terima ini juga gak bias karena kami gak punya lembaga riset sendiri, kami perlu dukungan informasi seperti itu, itu satu Pak.

Hal kedua saya pengen tau tentang *stress test*. Mungkin karena tadi saya tanya ini rapat terbuka/tertutup Pimpinan? Oh, terbuka ya. *Stress test* mungkin sampaikan secara umum dulu aja tapi detailnya mohon kami dilaporkan Pak. Terus sudah berapa kalangan perbankan sudah masuk wilayah yang mudah-mudahan ini tidak sampai kepada *bridge bank* ya, nah mudah-mudahan masih tahap pengelolaan. Kemudian dari *stress test* itu juga kita nanti bisa tau tadi berapa total 18 triliun? izin interaktif Pimpinan, total dana LPS sudah berapa Pak? 18 triliun? Nah, oh 118, nah sudah 118 triliun. Nah 118 triliun itu kalau menurut saya begitu ada satu masalah kita tau lah kita banyak dengar kondisi-kondisi perbankan yang sulit, itu sekali jalan hilang itu.

Jadi ini makanya saya *concern* dengan *stress test* yang dilakukan, ini kan kebetulan lengkap kan ada perwakilan KKSK ada semua saya rasa disini ada Bank

Indonesia, dari keuangan ada juga kan? kemudian juga dari OJK, nah ini penting untuk kita ketahui. Kemudian ada yang menarik mungkin udah disampaikan tadi karena saya agak terlambat, tentang digital ekonomi ini Pak, digital bisnis, digital *banking*, ini sampai sejauh mana kita bisa membantu meng-*cover* kondisi tersebut gitu karena kita lihat seperti *e-money* yang diusut oleh Bank Indonesia, kemudian *peer-to-peer* transaksi yang diusut oleh OJK, ini jawaban mereka dana-dana tersebut ditempatkan di Buku 4 kan, di bank Buku 4. Sebenarnya bukan itu yang ditunggu masyarakat, mau di Buku berapapun asal uangnya aman.

Jadi artinya kita juga tidak bisa mengelompokkan atau mengklasifikasi dana-dana yang ditempatkan masyarakat harus di Buku 4 semua gak bisa juga. Ini meng-*cover*-nya seperti apa, apa langkahnya gitu, apakah kita mau fokus di deposito saja gitu, bagaimana dengan di tabungan, bagaimana dengan tadi yang mereka, sekarang kan banyak dompet berbagai macam dompet itu, saya juga gak tau ini melalui Pak Erwin saya coba sampaikan lagi supaya teman-teman Bank Indonesia *firm* bahwa dasar memberi izin itu saya melihat masih lemah Pak, begitu juga OJK, sekarang kan kejadian itu kita lihat beberapa perusahaan yang sudah meledak kan, nah itu kan mungkin dua tahun yang lalu saya sudah menyampaikan itu baik ke Bank Indonesia maupun OJK gitu.

Nah kondisi seperti ini bagaimana LPS juga menyikapi gitu. Jadi maksud saya kalau memang diperlukan satu regulasi lagi untuk meng-*cover* itu semua mari kita duduk Pak, jangan kita berpangku tangan katakanlah LPS “oh kita kan soal penjaminan simpanan saja gitu”, nah simpanan apa, apakah deposito saja apakah tabungan juga apakah tadi yang masuk melalui giro dan lain-lain yang itu saya yakin itu tolong nanti OJK juga belum sampai sekarang belum disampaikan ke kami, nanti tolong yang melalui *ex-officio* yang ada disini itu laporan perusahaan-perusahaan fintek yang dananya ada di setiap bank itu tolong disampaikan ke kami, ini resmi kita minta Pimpinan karena ini penting sekali, sejauh apa dia sudah menyedot dana masyarakat gitu. Jangan sampai nanti sudah kejadian seperti kita lihat di media ada banyak hal sekarang muncul yang lalu kita lihat First Travel yang sekarang juga lagi ribut Hansen dan lain-lain itu. Nah jangan setelah ribut baru kita panik baru seperti apa gitu loh baru nanti diundang. Jadi jawaban kita diundang ke DPR, jawaban kita mencari jawaban-jawaban yang normatif sifatnya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bisa duduk atau regulasi seperti apa ya mari kita duduk bersaman gitu.

Dan mungkin saya juga pengen tau nih, sering kita dengar juga rapat-rapat di komite ini kan, Komisi KKSK ini, seperti apa tolong di-*update* mungkin melalui LPS hari ini.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Udah Pak Jon? Bu Indah, silakan Bu Indah.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Pak Dito, Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi XI dan tentu saja Bapak Ibu dari LPS, Pak Halim, Pak Didik, Pak Fauzi, dan Pak Erwin, selamat siang.

Bersyukur kita masih bisa berjumpa lagi di tempat ini khususnya saya bersyukur bisa bertemu lagi. LPS merupakan salah satu mitra kerja kita yang selama ini memang keberadaannya tadi Bu Ifa sempat mengatakan mungkin ada masih sebagian masyarakat kita yang belum *aware* terhadap peran dan fungsi LPS yang memang sangat vital dan penting itu. Sebagai bagian dari KSSK, ini kan perannya juga penting apabila terjadi sesuatu, goncangan, dan dinyatakan krisis gitu maka pada saat kita membahas undang-undang PPKSK waktu itu Pak Erwin juga terlibat, betapa pentingnya peran dan fungsi dari Lembaga Penjamin Simpanan.

Harapan kami tentu saja LPS ini bisa berperan lebih aktif, lebih keliatan perannya untuk bukan hanya sosialisasi ya tapi lebih daripada itu adalah edukasi. Mengingat memang, tadi ananda Puteri bagus sekali menyampaikan tentang perang bunga dimana kita memang selama ini sering membahas *net interest margin* Indonesia kita anggap juga terlalu lebar ya dibandingkan dengan negara tetangga yang lain, kita masih tinggi mungkin sekitar NIM kita empat mungkin ya empat sampai lima. Bank-bank kita gak efisien, BOPO-nya tinggi, nah saya pikir itu peran LPS juga bisa memberikan edukasi meskipun juga harus bersama dengan KSSK ya dengan tim Komite Stabilitas Sistem Keuangan kita.

Apa kira-kira terobosan, hal-hal yang bisa dilakukan oleh LPS untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita sehingga Pak Jon tadi sempat menyinggung jangan selalu menarik yang perang dagang itu ya selalu seluruh deh kementerian/lembaga yang hadir disini selalu menyebutkan tentang kondisi makro, kondisi global, yang bisa berdampak kepada kondisi perekonomian Indonesia. Kekuatan kita di dalam negeri sangat kuat. Kita tau bahwa VUKA ya selalu dibidang bahwa Volatilitas, kemudian apalagi U-nya itu, *Unpredictable*, kemudian Kompleksitas, *Ambiguity*, dan lain sebagainya, itu memang perlu kita cermati dan kita jaga bersama, kita antisipasi dan kita mitigasi resiko di dalam negeri kita tetapi kekuatan dalam negeri itu perlu kita jaga dan kita kuatkan bersama. Masukan-masukan dari kawan-kawan tadi untuk LPS tentu kami berharap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kita jaga bersama industri atau ekosistem industri jasa keuangan di kita meskipun saat ini baru perbankan yang mendapatkan cara-cara atau protokol menghadapi krisis tetapi kami juga tau bahwa akhir-akhir ini ancaman perbankan itu selain tadi antar perbankan yang memberikan bunga atau iming-iming hadiah-hadiah yang menarik itu juga diantaranya adalah *digital economy*, *digital banking*, yang membuat mereka juga kadang-kadang khawatir ditinggalkan oleh *customer*-nya. Tentu hal-hal seperti itu menjadi kewajiban kita bersama untuk membuat bank-bank kita menjadi satu dari industri jasa keuangan yang dipilih oleh masyarakat kita untuk bukan hanya menempatkan dananya secara aman, mendapatkan bunga juga

secara yang wajar, dan kemudian juga sebagai tempat untuk mendapatkan kredit dengan bunga yang cukup *fair*. Jadi mohon diperhatikan dan memberikan apa ya pendampingan dan konsultasi, koordinasi secara efektif bagi industri keuangan khususnya perbankan yang memang mayoritas menjadi tempat bagi masyarakat kita untuk melakukan transaksinya.

Jadi bank-bank kita lebih ditingkatkan sebagai bank transaksi sehingga mereka dibutuhkan benar keberadaannya oleh masyarakat karena saya tau meskipun saat ini fintek itu termasuk *peer-to-peer lending* dimana orang bisa kita tau bahwa resiko bukan hanya pada debitur tapi juga pada kreditur, anak-anak juga bisa semuanya ditangan dilakukan tetapi saya percaya bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia tuh masih lebih senang berhubungan dengan manusia, jadi lebih suka bertemu dengan *officer* perbankan itu masih kita butuhkan dan itu menjadi celah bagi kita celah positif untuk lebih membangun perbankan kita menjadi satu lembaga yang diminati oleh masyarakat Indonesia dan bisa membantu juga di dalam menggeliatkan dan memberdayakan pelaku UMKM.

itu saja pesan saya untuk LPS, selamat berkarya kembali dan kami siap menjadi mitra yang baik bagi LPS untuk menjadikan seluruh program kementerian/lembaga yang ada di republik ini kembali sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat kita.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih yang terhormat Ibu Indah Kurnia. Mungkin dari meja Pimpinan ada? Pak Riko? Pak Hatari?

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S. /F-PDIP):

Terima kasih Pak Ketua.

Rekan-rekan Pimpinan juga rekan-rekan di Komisi XI DPR RI, Pak Halim, saudara saya Pak Fauzi Ichsan dan seluruh satu per satu yang tidak bisa saya sebutkan.

Saya singkat dan konkret saja dari untuk masukan ke LPS, bukan masukan lagi sebenarnya, ini bisa dijalankan secara nyata. Kita memang tidak boleh munafik, tadi yang dikatakan oleh mba Indah tadi bahwa...(suara tidak jelas)... 4-5% itu terjadi karena kenapa? Karena memang permodalannya kecil, asetnya kecil. Jadi memang kita harus sepakat LPS, Bank Indonesia, keseluruhan komponen keuangan di Indonesia ini dan kita juga sebagai anggota dewan harus sepakat merubah undang-undang itu, bahwa tidak perlu terlalu banyak juga bank ya tidak ada lagi namanya bank Buku 1, 2, 3, 4, yang ada ya bank yang memang *sustainable* untuk ekonomi Indonesia yang besar ini tapi tentunya juga rigid kebawah tidak hanya bergerak di

sektor yang besar-besar saja, itu pertama.

Kedua, saya usul konkret saja bagi kita semua juga maupun juga LPS, sosialisasi ini perlu Pak. Jadi yang ngerti LPS itu menjamin 2 Miliar, kemudian bunganya dan lain-lain itu gak ada yang ngerti Pak, Bapak boleh cek *gausah* jauh-jauh di dapil saya aja Jakarta Selatan, Pusat, yang cuman 500 meter dari istana, gak ngerti apa itu LPS itu, itu apa ya makhluk apa LPS itu. Nah jadi saya konkret saja, kita ini kan banyak dapilnya, kita sosialisasi saja langsung Pak Fauzi Ichsan, apalagi kalau ngelihat Pak Fauzi Ichsan yang ganteng ini ya pasti kan Ibu-Ibu pada kumpul kan? nanti tugas kita ngumpulin di pasar, saya ini sederhana-sederhana saja yang konkret-konkret saja. Gak ada Pak kalau Bapak lewat televisi lewat ini *ndak* didenger juga. Nah bagi yang muda-muda seperti mba Puteri ya nanti lewat sosial media dengan cara-cara yang menarik ya kan, apa dengan animasi, dengan segala hal lah. Nah ini kita harus lakukan, supaya apa? Supaya semuanya sepakat paham mengerti bahwa uang yang ditaro itu aman, seperti itu.

Begitu juga mereka memahami sebenarnya yang seperti apa baik itu bank, BPR, dan lain-lain yang memang baik dan benar. Nah ini saya rasa konkret saja dan saya rasa teman-teman juga termasuk Pak Misbakhun pasti setuju kan, apalagi Pak heri. Nah kita lakukan saja, Bapak-Bapak tidak punya prasarana, yang punya itu kami disini, saya bisa gerakkan di *market* di pasar berapa banyak orang yang perlu hadir, Pak Sihar Sitorus bisa gerakkan di sekitar danau toba, nah katanya kita mau membangun danau toba, mau membangun destinasi bali baru, tapi kerjanya sendiri-sendiri, saya melihat itu saja, kita berpikir sendiri-sendiri, kita berpikir untuk kepentingan kita saja, kita berpikir untuk prestasi kita saja. Nah menurut saya tidak cukup seperti itu.

Jadi kita mari kita saling bersinergi, ayo Pak kita buat programnya melalui Ketua, melalui meja Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi XI ayo kita buat hal yang konkret sajalah supaya masyarakat ini semua paham apa manfaat dari LPS bahwa lembaga ini menjamin apa yang disimpan sehingga tidak ada lagi nanti yang terjebak dengan hal-hal yang tertarik dengan hal-hal yang tidak masuk diakal. Satu bulan berapa mba Indah bunganya, 10%, 20%, iya kan? iya, *too good to be true*.

Itu menurut kami jadi konkret saja ini bisa dilaksanakan bukan sekedar usulan tapi ini bisa kita lakukan di Bapak-Bapak di LPS maupun di pemerintahan maupun di lembaga keuangan ini menjadi satu hal yang positif, bagi kami juga namanya wakil rakyat ada manfaatnya jangan cuman, kan mereka tidak ngerti ini apa tugasnya si Eriko ini ngomong aja di koran di tv, emang dia ngerti *gua* susah apa kagak, *gua* minjem aja 500 ribu bunganya, Pak Halim udah pernah Pak ke pasar bunganya berapa Pak? Pak sehari bunganya tuh bisa 10-20% Pak, memang kelihatan kecil 500 ribu 10% 50 ribu Pak, nah sehari, itu satu orang, hah? *ah* Pak Heri ini jangan nambah-nambahin *ah*, masa saya, iya-iya kalau sehari kan *ampe* besoknya ya Pak ya, pinjam pagi pulang sore atau malam begitu loh Pak. Nah mungkin kita nganggap *ah* berapa sih 50 ribu, 50 ribu kalau ada 1 juta orang yang melakukan hal seperti itu memang. Pak kalau kita mau bicara jujur ini teman-teman sebenarnya menyampaikan terlalu muluk-muluk dunia lah, Amerika, China, segala macam, kalau

kita mau bicara jujur sebenarnya ekonomi Indonesia ini selamat karena mereka, karena golongan menengah kebawah ini, karena konsumsi, betul? Coba tanya sekarang penjualan mobil Pak Heri tinggal 30% turun, boleh ditanya, turun Pak, *ndak* ada yang gak turun, cuman kita aja yang mau disini mengatakan optimis 5,1 5,2 gak ada Pak, boleh dicek di *market*, gak ada. Simpel kok melihatnya, properti aja udah lemah, siapa orang sekarang mau pergi beli Pak, *ndak* ada. Karena kenapa? Sekarang punya uang 100 M, Bapak mau berbisnis apa saya tanya lah kita semua disini, *ndak* ada Pak, ini resiko itu resiko, paling nanti akhirnya ujung-ujungnya apa, yang *consumption* apa itu restoran, betul Bu? Warteg, begitu, itu yang bisa bertahan sekarang.

Nah bagaimana LPS ini bisa menjembatani ini kepada masyarakat bahwa mereka tidak ragu, itu menurut saya yang paling penting, dan itu tugas kami sebagai anggota dewan menjembatani ini antara Bapak-Bapak juga dengan masyarakat.

Saya rasa itu barangkali mohon maaf Ketua menyita waktu banyak dan teman-teman ini untuk menyadarkan kita bahwa kita ini kan sudah diberikan berkah berkat yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa, apa namanya adinda saya Fauzi Ichsan sudah dapat fasilitas, Pak Halim, kita semua lah, *ndak* usah kita. Bagaimana kita mengembalikan ini kepada rakyat, bagaimana kita jangan hanya menikmatinya sendiri dengan makanan yang nikmat ini dengan segala keberadaan kita bisa memakai jas disini karena dingin memang. Nah ini harus kita kembalikan Ibu Bapak sekalian semua, saya juga menghimbau teman-teman saya di DPR ini marilah ayolah kita lebih membumi lagi, nah LPS ini bisa melakukannya. Diuntungkan LPS kita juga sebagai wakil rakyat diuntungkan, mari kita susun Ketua, program yang logis, *ndak* usah nanti dibilang *ah* Eriko duluan yang mau di Jakarta Selatan, *ndak* Pak, ke tempat Pak Heri duluan juga boleh, ke tempat Pak Sihar dulu Bang Sihar juga boleh, ke tempat Pak Dolfie juga boleh *ndak* masalah, tapi jangan lupa bahwa kantor kita di Jakarta Selatan dan Pusat juga Pak, jangan Bapak Ibu lupa, LPS di Jakarta Selatan atau Pusat Pak? Ya? Jakarta Selatan ya Pak Fauzi ya? Nah jangan Bapak lupa. Jadi Bapak duduk, Bapak tinggal, Bapak kerja ada di Jakarta Selatan Pusat, ya jadi jangan lupa juga untuk daerah-daerah strategis di Jakarta Selatan Pusat kan begitu ya. Artinya saya pun mendapat manfaat juga untuk itu. Sama luar negeri ya Pak Misbakhun ini memang *ndak* pernah lupa dia memang detail betul karena orang-orang dari akuntansi ini memang pemikirannya detail sekali.

Saya rasa itu saja barangkali Pimpinan, Ketua, rekan-rekan anggota dan juga LPS. Nah kalau begini kan sudah tersenyum Pak Halim apa, agak sulit Pak Halim saya lihat tadi tersenyum makanya saya harus bicara ini Pak Fauzi Ichsan juga tadi saya lihat serius sekali, Pak Erwin, Pak Didik. Saya rasa begitu ya masukan dari kami, dan ini Ketua konkret saja kita tindak lanjutin mungkin nanti Ketua instruksikan kita bentuk tim kecil barangkali kan begitu ya satu dua orang bisa mengkoordinasikan hal ini. Saya rasa itu barangkali dari kami. Terima kasih, ini kita lakukan untuk bangsa dan rakyat Indonesia, Merdeka!

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Izin Pimpinan sedikit saja menambahkan. Sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke silakan Bu.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Pak Fauzi, pada saat pertemuan beberapa waktu yang lalu saya mengusulkan untuk LPS itu memberikan pengumuman yang ditempatkan di *banking hall* seluruh bank, khususnya bank-bank mungkin justru yang malah bank yang kecil-kecil agar yang *too good to be true* tadi bisa dihindari bukan hanya perbankan mungkin ya, ditempatkan di beberapa tempat yang membuat masyarakat kita itu sedikit mendapatkan informasi bahwa yang di-cover itu hanya 2 miliar, dan bunga penjaminan itu hanya diberikan kepada yang simpanannya 2 miliar kemudian bunganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mereka langsung melihat di *banking hall* Pak terus dibawah ditulis Lembaga Penjamin Simpanan itu. Boleh dikasih fotonya Pak Fauzi juga boleh.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Baik silakan Pak Hatari.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si./F-P. NASDEM):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Komisi XI dan teman-teman anggota Komisi XI yang saya hormati, Pak Halim, Pak Fauzi, Pak Didik, kemudian dua yang terakhir ini luar biasa, Pak Edwin sama Pak Heru.

Terima kasih, kami Pimpinan Komisi ini hanya ingin mem-*balance* ketika anggota sedang menyampaikan pandangan kami tidak pernah potong, kami sudah sepatutnya tata krama daripada setiap kali rapat. Nanti setelah terakhir kalau Pimpinan Komisi berbisik Pak Hatari mungkin ada tambahan, Pak Erik mungkin ada tambahan, baru kami bicara, kalau tanpa itu kami tidak pernah. Jadi ini sekedar mem-*balance* aja tadi yang disampaikan oleh teman-teman semua dan Komisi XI yakin dan *haqqul yaqin* bahkan mudah-mudahan LPS ini tidak identik dengan asuransi Bumiputera, catatan Pak. Kasus yang terjadi dan menghebohkan

masyarakat pada tingkat bawah terkait dengan begitu susahnya mencairkan polis asuransi sehingga tadi dikatakan teman-teman banyak masyarakat tingkat bawah menanyakan kepada kami karena mereka tau kami di Komisi XI bermitra dengan LPS. Pak ini lembaga penjamin simpanan, apakah ini nanti tidak sama dengan asuransi Bumiputera yang masalahnya sampai hari ini tidak selesai, dan kami ini selalu undang undang undang. Asuransi Bumiputera belum selesai, datang lagi BPJS Kesehatan, jadi kami selalu terus-menerus begitu.

Kemudian Pak Halim dengan seluruh jajarannya, saya baca disini kinerja LPS tahun 2019 kemudian RKAT ini 2020, disini hanya total asetnya pada posisi bulan September itu kurang lebih 118,7 triliun. Pertanyaan saya kenapa tidak dicantumkan aktiva tetap dan aktiva lancar disini seperti pada halaman berikut itu *ter-breakdown* secara jelas, biar kami bisa mengukur laba sebelum pajak dan laba setelah pajak, ini di halaman 9 ini tidak tertampung, terlalu simpel. Tahun 2014 kalau tidak salah LPS telah menjual satu bank karena gagal, karena gagal kemudian LPS menjual bank itu, bank apa senilai berapa harga jualnya, untuk Komisi XI paling tidak perlu tau. Memang tadi dikatakan Pak Misbakhun yang terhormat, ada 111 bank di Indonesia. Barangkali satu negara di dunia ini yang banknya paling terbanyak, bukan hanya di ASEAN. Apalagi nilai rupiah yang nol paling terbanyak di dunia itu kita punya rupiah ini.

Jadi kemudian Pak, ini terkait tahun 2020 ini lagi proyeksi, proyeksi laporan keuangan LPS 2020 tadi 118,87 triliun. Di tahun 2020 diproyeksikan oleh LPS sebesar 139,85 triliun atau kenaikannya 17,82% atau setara kurang lebih 21,157 triliun. Pertanyaan, apakah ini tidak terlalu ambisius, dengan kondisi yang tadi sudah dipaparkan disini. Kondisi global dengan perang dagang ini satu orang Indonesia pun sampai saat ini tidak menduga kapan ini berakhir.

Jadi tadi dikatakan teman-teman memang ini perlu sosialisasi menyeluruh sebagaimana kami telah merancang redenominasi, bahkan itu pada waktu mau serahkan kepada badan legislasi oleh presiden stop, sosialisasi menyeluruh termasuk kepada petani, nanti kaget. Jadi sosialisasi memang penting, saya punya satu catatan ini yang saya apresiasi Pak, saya baca tidak banyak lembaga penjamin di dunia ini yang mempunyai mandat sebesar LPS kita. Oleh karena itu LPS berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan pencapaian kinerja yang *sustainable* yang berkelanjutan untuk menjadi lembaga penjamin simpanan dan resolusi bank yang terdepan dan diakui baik di tingkat nasional maupun internasional dan lebih khusus lagi di kawasan Asia ini Pak, Pak Halim ini apresiasi karena tercantum disini di halaman 12 jadi ada korelasinya ini *statement* dan ini harus betul-betul kesempatan testimoni loh Pak, pengakuan, komitmen itu mahal, jadi jangan sampai di tengah jalan komitmen itu bubar karena salah satu pihak memang pengkhianat. Saya baca disini pada poin yang ketiga Pak Halim, LPS menjadi anggota International Association of Deposit Insurers atau IADI dalam menyusun Memorandum of Understanding dengan beberapa LPS negara lain untuk pertukaran informasi dan *sharing* pengalaman, tadi sama dengan ini tadi Pak.

Jadi ini kembali lagi ke rencana kerja tahun 2020 tadi sudah saya jelasin Pak, surplus sebelum pajak 19,6 triliun, beban 0,1 , sementara surplus setelah pajak 19,18 triliun. Kita mau Pak di halaman yang pertama tadi proyeksi 2019 harus *breakdown*-nya seperti itu jadi biar kita lihat ada perbedaannya Pak, ini kan kita baca laporan keuangan Pak seperti kita membedah neraca, begitu Pak.

Jadi mungkin nanti 2020 ini kan belum waktunya bisa kalau kita rapat kerja sekali lagi Komisi XI berharap ini harus dirinci *breakdown*-nya, berapa aktiva lancar, berapa aktiva tetap, berapa beban, termasuk pajak. Maaf Pak Halim dan teman-teman ini kita saling memberikan penguatan karena kita mitra Bapak. Kalau baik sekali tentu kami bangga, begitu.

Terima kasih banyak Pak ...(suara tidak jelas) Pimpinan makasih banyak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Fathan ada silakan.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (Drs. FATHAN/F-PKB):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Halim yang saya hormati, Pak Edwin, kemudian Pak Fauzi Ichsan, Pak Didik.

Saya kira kita memulai rapat perdana ini antara LPS dan DPR dengan suasana yang kondusif. Saya hanya sedikit saja, yang pertama perlu saya ucapkan terima kasih kepada LPS karena memang selama ini ikut berkontribusi terhadap kemenangan saya gitu loh, jadi mitra yang baik sekali gitu loh Pak Misbakhun gitu. Nah jadi kita ucapkan terima kasih karena memang Pak Eriko, LPS sudah sosialisasi tapi memang kurang, saya kira perlu digenjut lagi itu Pak Fauzi gitu. Saya kira betul tadi bahwa sosialisasi penting di masyarakat karena kalau perlu tadi kita lihat RKAT nya itu belum banyak sosialisasi gitu, disamping anggota-anggota juga saya kira media sosial penting jadi memang betul tadi Pak Eriko mengatakan sosialisasi masih sangat kurang gitu perlu digenjut lagi gitu.

Yang kedua, muncul dari sosialisasi adalah tentang keinginan masyarakat LPS untuk termasuk penjaminan di LKM dan KSP, Lembaga Keuangan Mikro dan Kelompok Simpan Pinjam, ini dibawah luar biasa sekali gitu karena kemarin kasus di Demak kami di Kudus dan di Jepara juga itu pertanyaannya seperti itu gitu. Terus kalau kami nyimpan, kami pinjam di KSP-KSP kecil kemudian bangkrut kami lari kemana gituloh. Jadi itu saya kira ini tadi ada juga muncul tentang apakah *insurance* juga masuk dalam penjaminan atau apa gitu walaupun dalam dialog kami karena *insurance* kita kan masih kurang bagus gitu jadi mungkin *good governance*-nya atau

apanya jadi saya kira perlu dipertimbangkan kembali apalagi memang DPR lagi menyusun prolegnas ini bulan November gitu, apakah cakupannya kemudian kita perlebar kembali sehingga LPS juga bisa merambah sektor-sektor lain karena LKM dan KSP ini di masyarakat luar biasa sekali, tapi kalau negara gak hadir kan bagaimana nanti rakyat minta perlindungannya, sementara simpan pinjam mereka kan uang buat haji, uang buat arisan, uang buat khitanan gitu, simpan dulu di KSP-KSP kecil, LKM-LKM kecil tapi kemudian bangkrut bermasalah gitu loh. Nah itu dipidana pun juga tidak ada ujungnya kan gitu, panjang sekali prosesnya kan kadang gak sebanding.

Nah ini saya kira itu saja mungkin jadi masukan-masukan kita nanti kita rumuskan bersama apakah perlu perluasan kembali dari beberapa penjaminan.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik. Demikianlah tadi pertanyaan, pendalaman, mengenai substansi apa yang telah kita bicarakan hari ini dari Pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI. Selanjutnya kami persilakan Ketua Dewan Komisioner LPS untuk memberikan jawaban atas pertanyaan kami, silakan waktu kami persilakan Pak.

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Baik terima kasih Pimpinan.

Bapak dan Ibu anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.

Terima kasih atas berbagai pertanyaan, eksplorasi, dan juga beberapa masukan dan dukungan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian.

Perkenankan kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan untuk yang sifatnya terkait dengan kebijakan atau *policy* mungkin nanti kami akan menjawab bersama-sama dengan beberapa anggota komisioner yang lain, yang terkait nanti dengan kinerja, yang terkait dengan operasi sehari-hari LPS itu akan kami mohon bantuan dari, dan izin dari Bapak Pimpinan dan anggota sekalian, dijawab oleh Bapak Fauzi Ichsan selaku Kepala Eksekutif yang menangani hari-hari LPS.

Baiklah kami akan mencoba menjawab secara barangkali ini ada beberapa pertanyaan yang hampir bersamaan tetapi juga nanti kalau yang spesifik kita juga akan menjawab. Yang pertama dari Pak Dolfie, Pak Dolfie mempertanyakan, intinya mempertanyakan *early warning system* yang dimiliki oleh LPS dan juga dikaitkan dengan KSSK ya. Mungkin kami ingin sampaikan bahwa masing-masing otoritas yang tergabung di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan, terdiri dari Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan, memiliki indikator-indikator tersendiri, Bank Indonesia memiliki indikatornya yang tentu terkait dengan moneter

dan pasar keuangan, OJK memiliki indikator-indikator yang terkait dengan kinerja di sektor keuangan baik perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan bukan bank. Sementara di LPS kami juga memiliki *early warning indicator* yang kami pantau yaitu yang terkait dengan perilaku simpanan karena ini adalah tugas pokok dari LPS serta bagaimana kira-kira gambaran dari kondisi perbankan karena perbankan apabila ada yang *likely to fail* istilahnya, yang akan gagal, itu tentu kami juga perlu memiliki indikator.

Pada saat ini kami sedang mengembangkan beberapa indikator yang lain yang untuk mempertajam kondisi yang ada, tapi yang sekarang sudah kami sampaikan dan sudah di-*approve* oleh KSSK, yang pertama tentu adalah sesuai dengan undang-undang, kami harus meng-*observe* harus menjaga agar cakupan penjaminan yang kami miliki itu minimal 90% dari total rekening ataupun nilai sebetulnya, ini yang pertama, ini adalah indikator yang pertama. Yang kedua kami juga sudah mengembangkan indeks ...(suara tidak jelas) Pak istilahnya seperti itu, indeks ...(suara tidak jelas) ini berasal dari perilaku simpanan, simpanannya nanti akan kami teliti apakah dalam suatu waktu kita juga dalam situasi yang normal atautah waspada atautah krisis, ini kita ada indeksnya Pak. Kemudian yang ketiga kami juga meneliti perilaku dari simpanan apakah terjadi pergeseran simpanan dari satu bank ke bank yang lain atau dari bank diambil dan dibelikan ke aset yang lain, jadi bisa yang namanya *flight-to-safety* bisa *flight-to-quality*, ini adalah indikator-indikator yang kami miliki. Dan yang terakhir kami juga sempat tadi sampaikan, meneliti *probability of default* dari bank, dan ini kami masukkan ke dalam yang namanya *breaking* ...(suara tidak jelas)

Jadi ini ada sekitar empat indikator Pak yang kami miliki dan ini kami sampaikan ke KSSK. Nanti Bank Indonesia punya sendiri, OJK punya sendiri, tentu kami tidak dalam posisi untuk menjelaskannya, Kementerian Keuangan juga punya sendiri Pak. Itu pertanyaan yang pertama.

Lalu yang kedua Pak Dolfie juga mempertanyakan

F-PDIP (DOLFIE O. F. P.):

Pimpinan, boleh menanggapi sebelum ke menjawab yang kedua?

KETUA RAPAT:

Silakan-silakan Pak Dolfie, silakan.

F-PDIP (DOLFIE O. F. P.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Halim, kalau memang ada empat indikator itu bisa ditunjukkan gak atau nanti dilengkapi secara tertulis supaya kita punya keyakinan tentang sistem perbankan kita ini dalam situasi apa sih sekarang. Kan Bapak memulai tadi di awal

paparan tentang situasi yang kita hadapi ini kan *global crisis*, kita menghadapi tantangan, tapi tidak tergambar sistem perbankan yang dideteksi Bapak dengan empat indikator itu seperti apa perkembangannya dari tahun ke tahun, semakin baik atau semakin buruk? Jadi nanti mohon dilengkapi Pak Halim dengan tertulis mengenai hal yang tadi Bapak sampaikan bahwa di LPS punya empat indikator.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan lanjut Pak Halim.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Sebentar-sebentar ini sama juga, boleh saya interupsi sedikit saja. Berkaitan mengenai krisis global, saya kira sama ini sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Dolfie, Pak Misbakhun, sepertinya kita ini setiap lembaga keuangan hampir iramanya “jazz” semua, kita mau ada yang “dangdutnya” gitu loh Pak, agak sedikit beda gituloh versinya, nah indikator itu yang kita butuhkan. Bagaimana juga mengenai rencana *impeachment* terhadap Trump, nah itu nanti jadi *excuse* lagi gitu loh Pak, nah ini kan ada isu politik di Amerika bahwa bulan November ini sudah mereka sekarang lagi melakukan tahap *questioning hearing*. Nah di bulan November minggu kedua itu sudah ada keputusan, antisipasinya apa gitu loh Pak karena ketika ini terjadi *impeachment* dampaknya juga ekonomi kan disana juga pasti akan ada perubahan secara signifikan, nah Indonesia bagaimana, punya *buffering*-nya gak, nah ketika Bapak berbicara masalah LPS disini nanti kita panggil OJK besok, sama 11-12, kemarin Ibu Sri Mulyani sudah memaparkan hal yang sama krisis global krisis global, zaman 2008 *subprime mortgage* dan terjadi juga krisis Yunani sampai sekarang saya cuti lima tahun saya pikir ada perubahan gituloh cara berpikir yang katanya sama aja *copypaste* gitu loh.

Jadi saya ingin teman-teman LPS itu berpikir punya indikator yang *out of the box*, terobosan-terobosan apa yang bisa dilakukan kedepannya, jangan selalu semua nadanya sama, apa ini sudah *driven* dari satu lembaga keuangan yang disana atau bagaimana, jadi kita jangan *suudzon* juga, akhirnya kita mengkait-kaitkan itu gitu loh karena hampir semua nadanya sama. Jadi saya bilang perlu ada program yang jelas atau terobosan baru yang jauh sedikit berbeda dengan Kementerian Keuangan walaupun disini ada *ex-officio* dari Kementerian Keuangan, ada *ex-officio* dari OJK, tentunya kan punya pandangan yang berbeda-beda. Jadi saya ingin mendapatkan pandangan yang jangan kita tinggal karena *excuse* indikator ekonomi global, besok Turki kita bicara persoalan masalah Turki, besok lagi nanti ada krisis China belum ada ini, ini bagaimana kita harus punya *early warning system* atau mitigasi yang dilakukan oleh LPS gituloh.

Jadi hal-hal itu tolong diperjelas, *gapapa* gausah dijawab tapi saya perlu ada *highlight* untuk penekanan terhadap persoalan yang sama saya sampaikan mengenai juga apa yang disampaikan Pak Dolfie dan teman-teman yang lain.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik lanjutkan, masih belum selesai.

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Baik terima kasih Pimpinan. Terima kasih atas masukan dari Bu Vera dan juga Pak Dolfie, tapi nanti kami akan bisa sampaikan Pak indikator-indikator yang kami gunakan untuk...(suara tidak jelas)...dan juga nanti pemikiran Bu Vera terima kasih atas masukannya.

Pertanyaan Pak Dolfie selanjutnya mengenai indikator-indikator yang digunakan oleh LPS dalam mengukur kinerja. Sebetulnya ini setiap tahun kami melaporkan ke presiden dan juga ke DPR dalam hal ini Komisi XI, dan nanti akhir tahun biasanya kami akan sampaikan. Tadi juga ada yang bertanya mengenai anggaran secara keseluruhan bagaimana evaluasi kami tentang anggaran tahunan 2019 ini masih belum selesai Pak, tapi biasanya nanti kami akan menunggu hasil dari BPK, setelah itu kami akan laporkan secara resmi baik ke presiden maupun ke ...(suara tidak jelas) DPR RI. Untuk informasi, untuk indikator

F-PDIP (DOLFIE O. F. P.):

Interupsi Pimpinan, Pimpinan, Pimpinan interupsi. Sebelum melanjut ke yang berikutnya Pak, tadi mengenai kinerja LPS, di pasal 86, pasal 87 itu kan jelas Pak tiga bulan sebelum tahun buku dimulai. Kalau itu dimulainya Januari, sekarang waktu yang tepat sebenarnya untuk Bapak menyampaikan, apa lagi rapat kerja kita memang topiknya mengenai kinerja LPS. Kan ini gak disampaikan nih di dalam rapat ini apakah memang LPS berpikir kita hanya pengenalan sehingga materinya umum atau nanti disusulkan tentang kinerja keuangan dan kinerja program-programnya atau bagaimana karena kalau saya baca di pasal 86 dan 87 ini jelas kok bahwa laporan evaluasi pelaksana anggaran tahunan berjalan diserahkan kepada presiden dan DPR. Tahun berjalannya kan sekarang tahun 2019, nah alangkah baiknya itu juga bisa kami dapatkan Pak supaya kita bisa dapat gambaran sehingga 2020 itu kita sudah punya gambaran LPS ini berangkat dari mana di dalam programnya di 2020, itu Pak Halim.

Terima kasih.

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Pimpinan, seperti diketahui memang dewasa ini kami sedang melakukan pembahasan bersama-sama dengan Kepala Eksekutif, Pak Fauzi, belum selesai Pak. Jadi biasanya memang kita akan kalau sudah selesai cepat pasti kami akan sampaikan Pak karena memang sekarang ini prosesnya sedang berlangsung, kami berharap November ini bisa selesai, akhir November. Kalau sudah selesai pasti kami akan segera mungkin melaporkan, menyampaikannya ke DPR dan juga kepada presiden. Begitu Pak Dolfie.

Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya Bapak menanyakan mengapa jumlah bank peserta menurun, lalu mempertanyakan apakah itu juga akan bisa mengganggu premi asuransi yang dibayarkan oleh bank ya. Seperti diketahui, bank peserta yang turun itu karena adanya likuidasi 100 BPR itu Pak dan karena dia sudah dilikuidasi berarti berakhir pula keanggotaan dia sebagai peserta penjaminan, sementara memang yang turunnya lebih dari 111 *eh* dari 100 BPR karena ada beberapa bank yang sudah merger dan diakuisisi. Akhir-akhir ini mungkin sebentar lagi Bapak-Bapak dan Ibu juga akan mendengarkan adanya beberapa rencana merger dan sudah disetujui oleh OJK, sehingga itu nanti akan semakin menurunkan jumlah bank yang ada di Indonesia. Selanjutnya mengenai evaluasi kinerja, tadi sudah kamu sampaikan kami akan segera mungkin untuk menyampaikannya ke Bapak.

Pertanyaannya Pak Musthofa, bagaimana definisi dari atau katakanlah bagaimana LPS menandai bank itu gagal, apakah hanya dengan tingkat kesehatan saja dan bagaimana antisipasinya. Sebetulnya kami seperti diketahui LPS ini bergerak atau beroperasi ketika OJK menyampaikan bank itu ke LPS, ukuran yang digunakan adalah ukuran yang ditetapkan oleh OJK dalam hal ini ketika modal bank atau *capital adequacy ratio* itu sudah menyentuh angka 4% atau kurang, itu oleh OJK dinyatakan bank itu gagal. Jadi seperti diketahui, ketentuan permodalan bank yang normal 8% tetapi ditambah dengan beberapa pencadangan sehingga tergantung profil resiko dari bank, bank itu punya kisaran modal antara 12 sampai 14 atau 16% tergantung dari apakah bank ini dianggap oleh OJK ...(suara tidak jelas) atau tidak. Kami hanya menerima ukuran bank gagal itu dari OJK, nah apakah antisipasi, apa antisipasi yang dilakukan oleh LPS ya tentu kami juga memiliki tadi disampaikan Pak Jon Erizal ya apakah kami bisa men-*share stress testing* juga kajian kami tentang bank gagal, dan pada waktunya mungkin Pak Jon kami tidak keberatan untuk men-*share* tapi mungkin dalam forum yang tertutup lah begitu ya Pak.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Izin Pimpinan interaktif. Tadi kondisi bank gagal itu Bapak sampaikan menunggu dari OJK, kan disini ada OJK Pak, ada *ex-officio* kan bisa nyampaikan juga paling engga secara umum dulu.

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Mohon maaf Pak Jon, ini kebetulan Pak Heru nya

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Oh, gak hadir ya? Yang mewakili gak ada Pak?

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Kebetulan gak ada Pak.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Oh oke. Pimpinan ini catatan juga kedepan harus hadir semua jadi *ndak*, maksud saya gak lempar ke sisi lain. Mudah-mudahan Pak Halim nanti bisa hadir semua pada saat rapat kerja, jarang kan kita bisa ketemu lengkap seperti ini. Apalagi LPS sering ke Pak Fathan nanti kayak tadi kan Pak Fathan bilang

(REKAMAN TERPUTUS)

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Baik Pak boleh kami lanjutkan Pak?

Yang berikutnya, apa ini tadi maaf, ada pertanyaan tentang ke masalah ketidakpahaman masyarakat terutama terhadap tugas pokok dan dari LPS saya rasa ini tadi beberapa anggota juga yang terhormat juga menanyakan masalah sosialisasi, seperti diketahui Bapak Ibu sekalian kami selalu setiap tahun melakukan pengukuran sebetulnya terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap tugas-tugas LPS, tiap tahun kami akan melihat kira-kira dari tugas mana yang belum diketahui, di daerah mana yang masih perlu kami lakukan penguatan, dan kira-kira melalui saluran apa gitu, ini selalu kami lakukan tiap hari.

Dan untuk itu seperti diketahui dari waktu ke waktu kami melihat umumnya di daerah-daerah yang banyak LPS melakukan likuidasi itu merupakan suatu daerah yang kita anggap prioritas karena biasanya di daerah-daerah seperti itu katakanlah kerawanannya secara sosial kita perlu minimalisir, seperti contoh pada waktu kami melakukan likuidasi di Bengkulu misalnya itu ada beberapa BPR yang cukup besar, sebelum kami melakukan likuidasi kami sudah mengajarkan melakukan sosialisai supaya masyarakat lebih paham. Ini adalah strategi yang kami selalu lakukan, namun kami juga menyadari untuk langkah preventif kami juga melakukan pemetaan daerah-daerah mana yang kita harus lakukan lebih awal, dan ini bisa saja bekerja sama, saya memahami beberapa anggota juga menyediakan diri untuk memberikan dukungan bagi LPS tentu ini kami hargai dan saya rasa kedepan kita bisa terus ini

Bapak dan Ibu sekalian dengan menggunakan pemetaan yang kami miliki, nanti kita akan melakukan kerja sama termasuk juga dengan anggota DPR. Barangkali seperti itu agar kita tidak katakanlah jangan sampai kita melakukan sosialisasi tidak tepat sasaran.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Pak Ketua saya interupsi izin, mohon izin Pak.

Kita perlu sepertinya Pak rapat tertutup Pak ya, kita ingin tau kondisi perbankan kita itu sebenarnya seperti apa, karena kita ini kalau lihat *sound*-nya semua orang kan ngomong krisis, krisis di Amerika ngomong apa, disini ngomong apa, dan tentunya kita kepengen tau seberapa kuat, seperti yang disampaikan oleh Pak Dolfie, seberapa kuat sih fundamental ekonomi kita khususnya perbankan kita, karena kalau kita lihat ya NPL kita memang dalam tahap yang aman, tetapi simtemnya itu ketemu gak Pak. Kalau simtemnya ketemu ini kan berarti ada gejala yang memang harus kita antisipasi. Karena ini rapatnya masih terbuka, kita kepingin rapat tertutup Pak, rapat tertutup kita untuk mengetahui kepengen apa, jangan sampai nanti begitu ada permasalahan itu datang yang...(suara tidak jelas)...Bapak, gitu loh. Yang pontang-panting Bapak maksud saya, sehingga kalau kita sejak awal dikasih *early warning*-nya sehingga apapun yang Bapak butuhkan kita bisa nyiapkan persiapannya ini apa. Jadi bahasa kita ini harus *clear* Pak sekarang, jangan sampai kemudian indah di depan kita begitu ya jadi cerita yang lalu, tiba-tiba ada kejadian yang pontang-panting Bapak, kerja profesional menghadapi ini semua tapi kita taunya adanya masalah, itu saja. Pak Ketua saya usul rapat tertutup.

F-PD (H. DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H.):

Pimpinan, Pimpinan interupsi boleh sedikit ya.

Saya kira apa yang disampaikan kawan-kawan barusan kekhawatiran mengenai situasi perbankan belakangan ini memang perlu ada rapat yang khusus saya kira, rapat tertutup saya sepakat saya kira ya. Karena selama ini kan situasi seolah-olah gak ada masalah, lalu *escape*-nya seolah-olah persoalan ekonomi global. Tetapi di tatanan publik juga khawatir apalagi ada isu, ada beberapa bank besar yang bermasalah dan sebagainya saya kira ini harus ada *event* khusus membahas ini saya kira.

Lalu kedua soal sosialisasi tadi Pak, ini kalau boleh saya kritisi tadi kan Bapak ingin melakukan pemetaan-pemetaan beberapa wilayah, saya kira kalau lembaga LPS ini sepengetahuan saya ini hampir seluruh Indonesia masyarakat kurang paham Pak, jadi harus lebih luas tidak sekedar pemetaan yang Bapak bilang, tanya saja di Jakarta berapa banyak orang paham mengenai LPS ini, padahal ini lembaga yang sangat penting agar masyarakat tuh benar-benar bisa menyimpan uangnya di bank dan terjadi perputaran uang.

Jadi saya kira lebih dari yang Bapak sampaikan tadi, jadi lebih luas tidak

sekedar pemetaan-pemetaan yang kebayang saya hanya mungkin fokus berapa wilayah, ini harus lebih intensif karena di Jakarta saja Pak mungkin di sekitar rumah saya bahkan itu banyak orang gak paham Pak, ini saya kira gak bisa dipungkiri. Mungkin itu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, sudah selesai Pak? Sedikit lagi.

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Ya terima kasih mungkin atas masukannya, jadi saya kira mungkin dalam rangka diskusi tentang kerawanan yang kita hadapi saya kira ada baiknya mungkin Bapak Pimpinan dan Ibu Bapak sekalian mengundang KSSK saja Pak, jadi kami nanti secara kelembagaan berempat bisa duduk bersama mungkin dalam pertemuan tertutup untuk bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, karena ini tadi juga ada beberapa pertanyaan sebetulnya apa saja yang dibicarakan di dalam KSSK, saya lihat ada baiknya barangkali lebih baik.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Saya usul Pak, mohon izin. Rapat KSSK aja Pak. KSSK kalau gitu yang kita panggil. Kita kan belum pernah sama KSSK sehingga lebih komprehensif lebih menyeluruh kita bisa itu Pak, oke setuju Pak, tapi rapatnya tertutup Pak.

KETUA RAPAT:

Setuju, kemarin kita sampai akhir masa sidang kan belum dijadwalkan, nanti kita susulkan saja rapat tertutup dengan KSSK ya, setuju ya semua ya? Ya rapat tertutup ya nanti kita lihat jadwalnya.

Ada lagi Pak? Karena kita harus selesai, karena kita akan akan dimajukan dengan Bappenas jam 3 jadi tidak boleh lebih dari setengah 2 termasuk kesimpulan. Silakan Pak kalau masih ada lagi.

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Kalau misalnya terburu-buru Pak kami tentu akan bisa menyiapkan secara tertulis.

KETUA RAPAT:

Engga terburu-buru, cuman, silakan, engga terburu-buru kok.

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Mungkin ada beberapa Pak yang dapat saya sampaikan kembali terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan ini Pak apakah program penjaminan LPS ini bisa diperluas sehingga mencakup juga polis asuransi. Ini saya lihat ada beberapa anggota yang mempertanyakan, sebetulnya begini Ibu Bapak sekalian ada prinsip yang namanya saya selalu menyebutnya 3P Pak, ketika kita ingin memperluas program penjaminan terutama ke dunia asuransi kita perlu memahami dulu yang pertama siapa yang akan menjadi lembaga pengaturnya, kalau misalnya ini asuransi, dalam hal ini sudah ada OJK, demikian juga lembaga pengawasnya dalam hal ini juga OJK. Nah sekarang tinggal nomor tiganya, penjaminnya, penjaminnya memang belum ada Pak. Saya memahami undang-undang asuransi sudah mewajibkan adanya suatu lembaga penjaminan dan ini tentu kami serahkan ke pemerintah dan juga DPR apakah nanti akan diserahkan ke LPS atukah juga membuat suatu lembaga yang baru.

Namun dari 3P ini, kita perlu sebelum melakukan penjaminan, melakukan semacam ...(suara tidak jelas) lah kalau orang keuangan selalu bilang. Bagaimana kualitas dari pengaturan, bagaimana kualitas dari pengawasan, dan bagaimana kesiapan lembaga penjaminnya. Nah ini barangkali tiga hal yang barangkali kami dapat sampaikan. Untuk isu mengenai perluasan penjaminan ini.

F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Interupsi Pimpinan, sedikit Pak. Sini Pak Ketua sebelah kanan.

Gini Pak Halim, tadi kan banyak masyarakat yang mau klaim ataupun banyak yang kebingungan masalah asuransi. Itu jutaan manusianya jadi nasabah. Jadi kan kondisinya genting mereka dan bukan 100 orang, 200 orang, tapi jutaan. Sebelum Bapak mengajukan kembali draf aturan itu, apakah tidak bisa kita melalui PP? Perpres? Keadaan genting itu bisa tidak? Nah gitu, keadaan genting itu bisa Pak Perpres gitu. Nah jadi coba dipikirkan, itu kan ide masukan-masukan saya Pak Halim.

Terima kasih Pimpinan.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Gini-gini, Pimpinan, Vera sedikit. Ini masih berkolerasi dengan asuransi, memang undang-undang asuransi itu yang di tahun 2013 kalau tidak salah, 13 atau 14, sebelum masa berakhir periode yang lalu, saya ikut terlibat. Memang itu payung hukumnya sudah ada tapi lembaganya pada saat itu teman-teman belum mengatur kepada siapa yang menjadi tupoksinya. Kita berkeinginan pada saat itu 2009 pada periode pada sama dengan Pak Dolfie, ya ada satu lembaga, apakah itu bisa di-*insert* dimasukkan ke LPS, namun dalam undang-undang LPS ini memang belum mengatur. Nah tentunya yang paling tepat adalah segera lakukan revisi undang-

undang LPS biar sinkron, kan saya melihat ini anggota dewan komisionernya kan bisa kita *insert* disini khusus untuk asuransi.

Kemarin itu kan karena kita fokusnya untuk OJK saja, ternyata OJK ini kan gagal, *fraud*, kalau saya jujur OJK ini gagal, kita bentuk itu karena memang salah satunya untuk menanganiantisipasi terhadap asuransi, itu kan mereka punya sendiri dewan komisioner yang mengatur hal tersebut. London aja bisa gagal ditutup dikembalikan lagi ke bank sentral. Nah ini saya menganggap ini kegagalan OJK yang tidak melakukan *early warning system*, dia cuma tarik premi-sosialisasi, tarik premi-sosialisasi, *that's it*. Ternyata itu sudah pernah kita bahas pada saat itu, OJK itu harus ada satu komisioner yang memang fokus terhadap *early warning system* terhadap asuransi, dulu di tempatnya Bu Tinu yang melakukan sosialisasi itu.

Nah saya gak tau setelah pergantian rezim OJK yang baru itu sejauh mana karena saya gak ngikutin, nah kalau bisa, kalau Bapak ini kan cuma ... ketika gagal Bapak bayar. Nanti tunggu dulu ini aturan dari OJK, apakah dia dianggap lampu merah, *ijo, eh* apa kuning, atau merah. Bapak kan menunggu sampai merah dulu nih ya kan, ini bahasa sederhananya saja. Ketika sudah merah baru kita *gedubrak-gedubrak* antisipasi, yang disampaikan Pak Misbakhun, baru kita kebingungan semua.

Nah artinya segera lakukan perubahan terhadap undang-undang LPS, artinya menguatkan tadi saya awal dari awal saya bilang kuatkan LPS ini, bukan menjadi pesaing OJK, tidak, karena ketidakberhasilan OJK ya kalau bisa ya memang LPS ini yang kita perkuat. Jujur LPS dari tahun 2004 direvisi 2006, *fine* gak ada masalah sampai dirubah tahun 2008. OJK yang baru berkembang yang baru lahir dengan anggaran yang cukup signifikan, apa yang mereka buat? Saya mohon maaf ini saya agak gemes ini sama OJK ini emang mesti saya keramas ini OJK ini, terus terang benar jujur aja saya gemes, LPS ini kan lahir lebih awal dibandingkan OJK.

Saya bukan mengatakan ini LPS cuman "nih ada masalah nih lo bayar nih nasabah" *that's it*. Tapi OJK kan belum pernah mengeluarkan satu *statement* bahwa ini *orange* atau merah, tunggu merah dulu baru LPS *gedubreng-gedubreng* bayar, ini yang kita gak mau lakukan. Masukkan itu atau kita kembalikan kita potong yang punya asuransi masukkan ke OJK, selesai kan? atau memang gimana OJK ini kan cuma lembaga sosialisasi sosialisasi mitigasi preventif *that's it*. Tapi kalau udah bayar, gagal bayar, baru LPS *gebok-gebok* suruh bayar. Ini saya terus terang agak gemes bener ini, saya pikir tolong ini segera direvisi, ini dulu OJK yang menghalangi untuk dilakukan bahwa asuransi itu masuk ke dalam LPS, saya tau itu hal-hal seperti itu, oknum itu yang memang menggagalkan supaya LPS itu masuk di dalam, asuransi itu masuk untuk di tupoksinya LPS.

Jadi saya kira tolong Pimpinan ini menjadi catatan bukan hanya persoalan masalah asuransi, kita gak bisa masuk mau ngomong sampai sampai berbusa juga gak bisa karena memang gak ada payung hukumnya nunggu peraturan presiden itu terlalu tinggi. Sebetulnya di dalam undang-undang asuransi sudah ada, gak usah nunggu-nunggu presiden gitu loh, tinggal siapa yang mau mengatur gitu loh.

Jadi saya kira itu saja masukan masa sidang berikutnya menjadi inisiatif DPR terhadap perubahan asuransi, perubahan undang-undang LPS yang khususnya berkaitan masalah asuransi karena ini udah gak bisa lagi kita tunggu, ini udah membludak, terkait masalah Bumiputera juga dan lain-lainnya. Dan juga mengenai aturan-aturan tadi tambahan-tambahan pekerjaan Bapak, tadi yang saya sampaikan di awal, itu belum ada *legal binding*-nya walaupun masih dalam PO peraturan LPS.

Saya kira terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik silakan Pak, masih ada Pak?

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Pimpinan Pimpinan, gak saya mohon aja karena mau rapat Baleg. *Update* tentang program restrukturisasi dana premi restrukturisasi perbankan karena ini mandat dari undang-undang PPKSK. Sejauh mana perkembangannya, mohon di-*update* karena ini sangat penting untuk premi, Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) karena nanti ada program PRP di tahun 2020 yang akan dilakukan infrastrukturnya, termasuk payung hukumnya.

Terima kasih.

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Pimpinan mohon izin. Sebetulnya kami masih ada sekitar dua isu lagi Pak karena dari pertanyaan-pertanyaan para anggota itu bisa kami klasifikasikan yang terkait dengan LPS tadi sebagian besar sudah kami jawab, sosialisasi sudah, amandemen undang-undang ...(suara tidak jelas) kita sudah diskusikan, lalu yang terkait dengan kondisi sekarang itu nanti apabila dalam waktu dekat itu bisa rapat dengan KSSK, sebagian besar isu yang ditanyakan itu pasti akan bisa terjawab. Lalu yang terakhir ini mengenai masalah PRP yang disampaikan oleh Pak Andreas, PRP ini dari keputusan di KSSK kira-kira pertengahan tahun yang lalu, diputuskan pengenaan preminya ditunda Pak sehingga peraturan pemerintahnya pun kelihatannya ini masih agak tertunda, belum selesai Pak. Drafnya sudah selesai tetapi ketika detik-detik terakhir dengan berbagai pertimbangan terutama karena kondisi ekonomi kita dan kondisi perbankan, KSSK memutuskan menunda pengenaan premi PRP ini, paling tidak sampai tahun depan belum akan dikenakan Pak.

Itu yang dapat saya sampaikan, tapi nanti untuk lebih detailnya kita lebih diskusi mengapanya itu di dalam rapat KSSK barangkali para Pimpinan.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Ini yang penting, oke kalau ditunda terus solusinya apa, karena gak berhenti hanya sampai ditunda aja kan, karena ini mandat undang-undang, gitu loh. Kalau ditunda kemudian pertanyaannya, kesiapan dari LPS kalau itu ditugaskan untuk restrukturisasi, darimana? Kan itu yang nanti tolong disampaikan, kan gak cukup hanya dengan menunda, ya kalau menunda itu kan sebetulnya kita mengalihkan masalahnya itu ke depan tapi apa, karena tadi disampaikan kan mestinya konsepnya kan untuk LPS ini *hope for the best but prepare for the worse* gitu ya. Jadi ini yang penting, karena di undang-undang PPKSK itu ...(suara tidak jelas) jelas bahwa LPS ditugaskan untuk melakukan restrukturisasi, bagian dari LPS. Karena itu kemudian ada yang disebut salah satu pendanaannya dari premi untuk PRP tersebut. Nah kalau ini kemudian ditunda, pertanyaannya adalah apa kalau sampai terjadi nanti solusinya apa kan demikian, gak cukup hanya dengan menunda. Maksud saya demikian.

Terima kasih.

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Boleh kami respon sedikit? Pengenaan preminya ditunda Pimpinan dan Ibu Bapak sekalian tetapi program persiapan penyiapan PRP masih jalan, oleh karena itu berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah keluar yang terkait dengan PRP, unit PRP-nya di dalam LPS sudah ada, biaya operasionalnya sementara meminjam dulu Pak dari LPS yang diluar PRP, seperti itu. Nanti kemudian ketika premi sudah dikenakan, itu akan dikembalikan.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Tata kelola apakah tepat? Karena kan dana untuk penjaminan simpanan, terus kemudian dipinjam, nah ini pinjam ini nanti yang perlu kita, kita ini sering kali seperti itu gitu, tapi kalau terjadi krisis betulan akan jadi masalah gitu loh karena kan payung hukumnya jelas gitu ya. Kan untuk dana namanya premi penjaminan ya untuk menjamin simpanan, ini kan dipakai istilahnya, dipinjam, nah ini sebetulnya dari tata kelola juga perlu nanti kita bicarakan gitu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Jadi mungkin isu ini akan lebih jelas kalau dibicarakan di KSSK barangkali Pak.

Demikian barangkali penjelasan dari kami Bapak Pimpinan, Ibu Bapak sekalian, mohon maaf mungkin tidak seluruhnya secara lengkap namun hal-hal yang belum nanti akan kami sampaikan secara tertulis barangkali.

Demikian mungkin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik Pak terima kasih kepada Ketua Dewan Komisiner LPS, Pak Halim. Tentunya pertanyaanya yang lain tolong jawab secara tertulis juga Pak ya.

Baik kita sekarang masuk ke kesimpulan, silakan ditayangkan. Kesimpulan rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Lembaga Penjamin Simpanan, Rabu 6 November 2019, itu mestinya ditambahkan nanti ditambahkan ya masa sidang berapa gitu.

1. Komisi XI DPR RI meminta Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahun 2020 dan evaluasi pelaksanaan tahun 2019. Dapat diterima?

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Pimpinan boleh usul, bisa ditambahkan sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang LPS Pak yang nomor.

KETUA RAPAT:

Sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang LPS Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS. Setuju ya? Setuju Pak? Setuju kita ya semua?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi XI DPR RI mendukung penguatan Lembaga Penjamin Simpanan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Ini gak normatif aja nih, kayaknya selalu deh isinya mungkin. Standar.

F-PDIP (DOLFIE O. F. P.):

Pimpinan, mandatnya sekarang kan pada perbankan, mandatnya sekarang kan pada sistem perbankan. Kalau ini kan berarti melampaui, melewati.

KETUA RAPAT:

Iya, penjaminan simpanan untuk, undang-undangnya apa Pak Halim?

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Di dalam Undang-Undang LPS memang disebutkan stabilitas sistem perbankan Pak. Di dalam undang-undang PPKSK istilahnya menjadi stabilitas

sistem keuangan.

KETUA RAPAT:

Oke jadi Komisi XI DPR RI mendukung penguatan Lembaga Penjamin Simpanan untuk memastikan stabilitas sistem perbankan Indonesia, gitu Pak ya? Oke, perkembangannya hilang. Oke setuju Pak ya? Pak Dolfie? Setuju Pak ya, oke.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi XI DPR RI meminta Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyiapkan strategi dalam menghadapi krisis ekonomi di tengah menguatnya resiko pelemahan ekonomi global.

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Mungkin kalau boleh usul Pak Pimpinan, Komisi XI DPR RI meminta Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota KSSK untuk menyiapkan strategi dan seterusnya, karena kami tidak mungkin melewati peran kami

KETUA RAPAT:

Betul, jadi tupoksinya LPS aja.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Pimpinan, masukan saya Pimpinan. Ini mereka mempersiapkan terus mau ngapain gitu? Disiapkan aja kita gak tau kapan persiapannya, jadi menurut saya harus ada akan disampaikan persiapan itu pada saat rapat kerja berikutnya atau seperti apa, ada *goal* seperti itu, kalau enggak, mereka bilang siap siap, kita gak tau deh siap atau belum, tau-tau ada yang kolaps baru nanti kita ini, jadi harus adaantisipasi kemana persiapan itu akan disampaikan.

Nah kalau saran saya, tadi kan udah ada keinginan kita mengundang komite ini supaya lengkap stabilitas, nah itu kita dapatin strategi dari LPS ini sebelum kita *meeting* itu Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi Komisi XI DPR RI meminta Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota KSSK untuk menyiapkan strategi dalam menghadapi krisis ekonomi di tengah menguatnya resiko pelemahan ekonomi global dan disampaikan kepada Komisi XI DPR RI. Betul Pak? Kurang mantap? Bapaknya ragu. Cukup Pak ya? Bisa

ya? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi XI DPR RI meminta Lembaga Penjamin Simpanan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat agar masyarakat merasa lebih aman dalam, lebih merasa aman dalam menabung uangnya di bank, lebih nyaman, apa ya, lebih nyaman, lebih aman dalam menabung uangnya di bank, gitu? Lebih aman dan nyaman.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Mungkin lebih bagus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

KETUA RAPAT:

Iya itu aja lebih bagus.

Ya Komisi XI DPR RI meminta Lembaga Penjamin Simpanan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat agar meningkatkan kepercayaan, gitu Pak Jon?

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Pak Pak, memberikan edukasi kepada masyarakat, itu juga bisa. Kalau sosialisasi juga perlu ada edukasinya kan. Jadi bukan hanya sebatas formalitas seremonial sosialisasi, tapi harus ada edukasinya.

KETUA RAPAT:

Oke jadi gimana kalimatnya?

F-P. DEMOKRAT (H. DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H.):

Pimpinan boleh saya interupsi?

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PD (H. DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H.):

Jadi saya kira di poin 4 ini agar memberikan kepercayaan dan rasa aman kepada masyarakat ya poinnya ya, memberikan kepercayaan dan rasa aman, dua

poin itu saja, tinggal dirumuskan kalimatnya saya kira. Karena sekarang yang diperlukan kepercayaan kembali masyarakat bagaimana mau menabung, menyalurkan uangnya ke bank saya kira.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Saya usul Pimpinan, jadi lengkapnya Komisi XI DPR RI meminta Lembaga Penjamin Simpanan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi sekaligus edukasi langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan dan rasa aman, untuk meningkatkan rasa aman kepada masyarakat terhadap sektor perbankan.

KETUA RAPAT:

Bukan, jadi langsung kepada, untuk dihilangkan. Untuk, ya kan, untuk meningkatkan kepercayaan dan rasa aman masyarakat, gitu? Dan rasa aman masyarakat dalam menabung, dan rasa aman masyarakat gitu aja lah, nabung nabung segalamacem gak perlu kayaknya kebanyakan, kepanjangan. Ya gitu aja kali ya.

Komisi XI DPR RI meminta Lembaga Penjamin Simpanan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi sekaligus edukasi langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan dan rasa aman, udah titik aja gak usah pakai masyarakat lagi mungkin ya, ya kan? rasa aman gitu ya.

F-PD (H. DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H.):

Pimpinan interupsi, kalimatnya masih, ini kan subjek dan ada predikat dan subjek, saya pikir dalam menyimpan uangnya di bank gitu, harus ada kalimat itu. Walaupun orang tau ini lembaga menjamin, tetapi di dalam kalimat ini harus lengkap saya kira.

F-P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Maksudnya Pak Didi itu objeknya, objeknya perbankan Ketua, sektor perbankan.

F-PDIP (DOLFIE O. F. P.):

Usul Pimpinan kalimat.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Dolfie.

F-PDIP (DOLFIE O. F. P.):

Jadi mulai dari sosialisasi sekaligus edukasi langsung kepada masyarakat agar kepercayaan dan rasa aman masyarakat meningkat dalam, agar kepercayaan dan rasa aman masyarakat terhadap bank.

KETUA RAPAT:

Pada perbankan lah. Meningkatkan? Pakai meningkat? Gak usah ya, gak usah kan, meningkatnya hilang aja.

Jadi Komisi XI DPR RI meminta lembaga penjamin simpanan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi sekaligus edukasi langsung kepada masyarakat agar kepercayaan dan rasa aman masyarakat terhadap perbankan. Setuju Pak? Setuju kita?

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI/F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Sebentar, masyarakat yang kedua ini di *drop* saja. Terlalu banyak masyarakat itu. Kepercayaan dan rasa aman terhadap perbankan. Gak usah lagi masyarakat terlalu banyak.

KETUA RAPAT:

Udah cocok setuju?

F-P. (H. DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H.):

Kalimatnya ini harus diperbaiki Pimpinan ya, jadi saya kira, agar meningkatkan kembali kepercayaan dan rasa aman masyarakat terhadap, kalau kalimat yang lebih tepat saya rasa dalam menyimpan uangnya di bank, karena ini kan lembaga ini lebih kepada penjaminan simpanan saya kira ya, kalau perbankan ini terlalu luas.

KETUA RAPAT:

Terlalu luas ya, oke betul, simpanan di bank gitu ya, betul betul.
Oke jadi gimana maksudnya Pak Didi tolong.

F-PD (H. DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H.):

Jadi kalau boleh ditambahkan gini ya jadi, Komisi XI DPR RI meminta Lembaga Penjamin Simpanan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi sekaligus

edukasi langsung kepada masyarakat agar meningkatkan kepercayaan dan rasa aman masyarakat dalam menyimpan uangnya. Jadi ada kata menyimpan atau apa ya, menabung, menyimpan uangnya di bank. Karena lembaga ini kan lembaga simpanan, menjamin simpanan, kalau perbankan terlalu luas saya kira. Tinggal dirumuskan.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si. /F-P. NASDEM):

Tadi yang diperbaiki sudah benar. Terjemahan konteks, jangan terlalu bias, kok semua itu poin 4 masyarakat masyarakat masyarakat, jangan bias terjemahkannya, jangan *letterleg*, harus terjemahnya konteks, konteksnya apa simpan uang di bank harus rasa aman.

F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Pimpinan, minta juga pendapat Pak Halim dan kawan-kawan itu, apa bahasa yang baik itu. Terus Pak Halim, saya ngingatkan yang penting realisasinya Pak, nah itu.

F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDDIN, B.Com.):

Izin Pimpinan, mungkin yang meningkatkan kegiatan sosialisasi itu bisa diganti aja jadi menggalakkan kembali kegiatan sosialisasi biar kata meningkatkannya tidak berulang, karena terlalu banyak kata meningkatkan disini lama-lama kita bertingkat nanti otaknya.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Mungkin gini Pimpinan, kalau menurut saya Komisi XI DPR RI meminta Lembaga Penjaminan Simpanan untuk melakukan, jadi diganti meningkatkan itu, melakukan lebih banyak lagi kegiatan, karena sebelumnya tidak melakukan kan, makanya memperbanyak.

F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDDIN, B.Com.):

Izin Pimpinan, mungkin mengintensifikasi biar lebih intens.

KETUA RAPAT:

Pak Halim kalau kurang paham, masih kurang, ini kan usulan dari Pak Eriko, Eriko juga harus tanggung jawab dong jangan usul aja. Silakan Pak Halim, silakan.

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Baik terima kasih Bapak Ibu sekalian.

Mungkin kalimatnya sudah hampir sempurna, saya ingin usulkan saja Komisi XI DPR RI meminta Lembaga Penjamin Simpanan untuk terus melakukan kegiatan sosialisasi sekaligus edukasi langsung kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan rasa aman terhadap simpanan masyarakat di perbankan, seperti itu Pak.

KETUA RAPAT:

Oke setuju ya?

F-PD (H. DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H.):

Pimpinan usul final, usul final, izin saya coba perbaiki kalimat mudah-mudahan bisa lebih baik. Komisi XI DPR RI meminta Lembaga Penjamin Simpanan untuk terus meningkatkan kegiatan, melakukan kegiatan sosialisasi sekaligus edukasi langsung kepada masyarakat dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat, mengembalikan saya kira ya.

KETUA RAPAT:

Jangan-jangan, meningkatkan. Udah percaya selama ini kan nanti dikirain gak percaya. Ini bisa menjadi masalah kalau pakai ini. Setuju ya? Oke jadi kesimpulan satu, dua, tiga, empat dapat diterima semua? Setuju ya?

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Pimpinan sebentar saya tadi usulkan mengenai revisi undang-undang, tadi kan dari Pak Halim mengatakan sedang disusun, tapi kita mesti kasih target gitu loh terkait dari masa sidang berikutnya, jadi Komisi XI meminta Lembaga Penjamin Simpanan untuk memberikan naskah akademiknya, kalau memang itu sedang disusun kan, tapi perlu ada.

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Kalau boleh. Untuk revisi amandemen undang-undang ini berada dibawah kesekretariat KSSK, jadi barangkali nanti kita bisa.

KETUA RAPAT:

Kita sudah jadwalkan dengan KSSK, nanti pada waktu dengan KSSK saja Bu

Vera.

Sudah ya, sudah ditutup dua kali ini, gak usah dicabut ya?

Baik Pak, dengan demikian berakhir sudahlah acara raker kita pada siang hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Komisioner dan seluruh anggota komisioner dan jajarannya serta Pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI yang telah mengikuti raker pada siang hari ini mudah-mudahan raker ini bermanfaat untuk kita semua dan sebelumnya kami persilakan Pak Halim untuk memberikan *closing statement*.

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS:

Baik terima kasih Bapak Pimpinan, Ibu, dan Bapak-Bapak anggota dewan yang kami hormati.

Terima kasih atas kesempatan untuk menghadiri rapat kerja ini, banyak masukan dan pertanyaan, serta dukungan yang kami terima, terima kasih sekali lagi dan mohon selalu *support* dari Ibu Bapak sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbilalamin*, Rapat Kerja pada siang hari ini saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.28 WIB)

Jakarta, 6 November 2019

**a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat**

ttd

**Drs. Urip Soedjarwono
NIP. 19620521 198203 1 001**